

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN FEDERAL SWISS
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK ATAS PENANAMAN MODAL

PEMBUKAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" atau secara individu disebut sebagai "Pihak");

MENGINGINKAN untuk mengintensifikasi kerja sama ekonomi guna keuntungan bersama kedua Negara;

MENYADARI bahwa penciptaan lingkungan bisnis yang ramah akan kondusif untuk menstimulasi inisiatif kegiatan bisnis dalam rangka penanaman modal yang lebih baik antara Para Pihak;

MENGAKUI pentingnya kontribusi penanaman modal terhadap pembangunan berkelanjutan, dan upaya peningkatan serta fasilitasi penanaman modal dalam wilayah Para Pihak;

MENYADARI bahwa dukungan dan perlindungan timbal balik Penanaman Modal tersebut akan menstimulasi inisiatif bisnis, mendorong laju masuk modal dan

teknologi, dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di kedua Negara;

BERKEYAKINAN bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai tanpa memperlemah aplikasi dasar standar kesehatan, keamanan, buruh dan lingkungan;

MENGUATKAN keberkaitan dukungan antara kebijakan penanaman modal, lingkungan dan buruh dalam hal ini;

MENEGASKAN komitmen mereka terhadap prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar ;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAB I
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

PASAL 1
DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. "Mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas" adalah mata uang, yang diperdagangkan secara luas di pasar valuta asing internasional dan digunakan secara luas dalam transaksi internasional;

2. "ICSID" adalah Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal;

3. "Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID" adalah *Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes* sebagaimana diamendemen dan mulai berlaku pada tanggal 10 April 2006;

4. "Peraturan Arbitrase ICSID" adalah Prosedur Umum Proses Pelaksanaan Arbitrase (Aturan Arbitrase), sebagaimana diamendemen dan mulai berlaku pada tanggal 10 April 2006;

5. "Konvensi ICSID" adalah Konvensi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara dan Warga Negara dari Negara lain, disahkan di Washington DC pada tanggal 18 Maret 1965;

6. "Penanaman modal" adalah setiap aset yang dimiliki atau dikuasai oleh penanam modal, secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki karakteristik suatu penanaman modal, termasuk karakteristik seperti komitmen modal atau sumber daya lainnya, ekspektasi pendapatan atau

keuntungan, asumsi risiko atau durasi tertentu. Bentuk suatu penanaman modal dapat termasuk namun tidak terbatas pada:

(a) suatu perusahaan;

(b) saham, modal dan bentuk penyertaan lainnya dalam perusahaan;

(c) obligasi, surat hutang, dan instrumen hutang lainnya dan pinjaman;[1], [2]

(d) hak kekayaan intelektual;

(e) tagihan atas uang, atau suatu perbuatan kontraktual berkaitan dengan suatu bisnis dan berdasarkan kontrak yang memiliki nilai ekonomi;[3]

(f) *Turnkey*, konstruksi, manajemen, konsesi produksi , pembagian-keuntungan, dan kontrak serupa lainnnya;

(g) lisensi, kuasa, izin, dan hak-hak serupa yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak terkait;[4] dan

---

[1] Beberapa bentuk hutang, seperti obligasi, surat hutang, dan hutang wesel jangka panjang, cenderung memiliki karakteristik penanaman modal, sedangkan bentuk hutang lainnya, seperti tagihan terhadap pembayaran yang segera jatuh tempo dan hasil dari penjualan barang atau jasa, cenderung tidak memiliki karakteristik dimaksud.

[2] Suatu pinjaman yang dikeluarkan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya bukan merupakan penanaman modal.

[3] Untuk memperkuat kepastian, penanaman modal tidak termasuk dalam tagihan atas uang yang muncul hanya dari:
(a) Kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa; atau
(b) Perpanjangan piutang yang berhubungan dengan kontrak komersil.

[4] Perihal apakah suatu jenis lisensi, kuasa, izin atau instrumen serupa (termasuk konsesi sejauh konsesi tersebut termasuk dalam instrumen dimaksud) memiliki karakteristik penanaman modal tergantung pada faktor seperti sifat dan sejauh mana hak yang dimiliki oleh pemegang hak menurut hukum negara Pihak. Di antara instrumen tersebut yang tidak memiliki karakter penanaman modal adalah mereka yang tidak menciptakan hak apapun yang dilindungi menurut hukum negara Pihak tersebut. Untuk memperkuat kepastian, hal tersebut di atas adalah tanpa prasangka terhadap apakah setiap aset yang terasosiasi dengan instrumen tersebut memiliki karakter penanaman modal.

(h) benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, serta hak-hak kekayaan yang terkait, seperti sewa, hipotek, gadai, dan jaminan leases.

Istilah "penanaman modal" tidak termasuk suatu perintah atau keputusan yang dimasukkan dalam suatu tindakan yudisial atau administratif atau suatu putusan arbitrase yang dibuat dalam proses arbitrase.

Sebagaimana tujuan definisi penanaman modal pada Pasal ini, pendapatan yang ditanamkan wajib diperlakukan sebagai penanaman modal dan segala perubahan bentuk dari aset yang ditanamkan atau ditanamkan ulang wajib tidak mempengaruhi karakternya sebagai penanaman modal.

7. "Penanam modal" berarti:

(a) Perorangan, yang berdasarkan hukum salah satu Pihak, adalah warga negara salah satu Pihak tersebut; atau

(b) Badan hukum, termasuk perusahaan, korporasi, asosiasi bisnis dan organisasi lainnya, yang dibentuk atau diatur sebagaimana ketentuan hukum dari Pihak tersebut dan berkedudukan, bersama-sama dengan kegiatan ekonomi nyata, di wilayah Pihak yang sama;

yang telah menanamkan modal;

8. "Perusahaan yang didirikan secara lokal" adalah perusahaan yang dimiliki atau dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh seorang penanam modal dari salah satu Pihak, didirikan di wilayah negara Pihak lainnya. Perusahaan adalah:

(a) dimiliki oleh perorangan atau perusahaan dari salah satu Pihak jika lebih dari 50 persen saham dimiliki oleh perorangan atau perusahaan milik Pihak tersebut;

(b) dikendalikan oleh perorangan atau perusahaan dari satu Pihak jika perorangan atau perusahaan tersebut memiliki kewenangan untuk menunjuk mayoritas direksi atau secara hukum berwenang menentukan tindakan yang diambilnya.

9. "Konvensi New York" adalah Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, diadopsi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tanggal 10 Juni 1958;

10. "Pendapatan" adalah jumlah yang dihasilkan atau berasal dari penanaman modal, termasuk, namun tidak terbatas pada, keuntungan, bunga, pendapatan, dividen, royalti, atau biaya.

11. "Wilayah" adalah wilayah negara dari salah satu Pihak sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan salah satu Pihak dimaksud sesuai dengan hukum internasional;

12. "Peraturan Arbitrase UNCITRAL" adalah *Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), sebagaimana diadopsi Panel Umum PBB pada 15 Desember 1976.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini berlaku untuk penanaman modal di wilayah negara salah satu Pihak, yang telah didirikan atau diambil alih dan, apabila dipersyaratkan, diakui[5] sesuai dengan hukum dan peraturannya oleh penanam modal dari Pihak lainnya, baik sebelum atau setelah berlakunya Persetujuan ini.

2. Persetujuan ini tidak berlaku untuk gugatan atau perselisihan yang timbul dari peristiwa, yang terjadi[6] sebelum Persetujuan ini berlaku secara efektif.

3. Persetujuan ini tidak berlaku untuk pengadaan pemerintah.

4. Pasal 5 (Perlakuan Nasional) tidak berlaku untuk subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak, termasuk pinjaman yang didukung pemerintah, jaminan, dan asuransi, atau untuk kondisi apapun yang melekat pada penerimaan atau penerimaan lanjutan dari subsidi atau hibah tersebut, meskipun subsidi atau hibah tersebut ditawarkan secara eksklusif kepada penanam modal dari Pihak dimaksud atau penanaman modal dari penanam modal Pihak dimaksud.

PASAL 3
TINDAKAN PERPAJAKAN

1. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini, tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang berlaku untuk tindakan perpajakan.

---

[5] Untuk memperkuat kepastian, dalam hal Indonesia, "*admitted in accordance with its laws and regulations*" dapat termasuk suatu persyaratan berupa persetujuan tertulis.

[6] Untuk memperkuat kepastian, Persetujuan ini tidak akan mengikat suatu Pihak sehubungan dengan tindakan atau fakta yang terjadi atau suatu situasi yang tidak lagi terjadi sebelum tanggal pemberlakuan Persetujuan ini bagi Pihak tersebut.

2. Persetujuan ini hanya akan memberikan hak atau membebankan kewajiban sehubungan dengan tindakan perpajakan di mana:

   (a) tindakan dimaksud diberikan atau dikenakan berdasarkan Pasal 7 (Ekspropriasi); atau

   (b) tindakan dimaksud diberikan atau dikenakan berdasarkan Pasal 9 (Transfer).

3. Dalam hal butir 2(a) atau 2(b) berlaku, Bab III, Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak lainnya) juga berlaku sehubungan dengan tindakan perpajakan.

4. Dalam hal satu penanam modal menggugat bahwa Pihak yang bersengketa telah melanggar Pasal 7 (Ekspropriasi) atau Pasal 9 (Transfer) dengan mengadopsi atau memberlakukan satu tindakan perpajakan, pejabat yang berwenang dari Pihak yang bersengketa dapat meminta konsultasi dengan pejabat yang berwenang dari Pihak yang tidak bersengketa pada saat Pihak yang bersengketa tersebut menerima pemberitahuan maksud penanam modal berdasarkan Pasal 19 (Pengajuan Gugatan). Pejabat yang berwenang dari Para Pihak wajib mengadakan konsultasi dengan maksud untuk menentukan apakah tindakan perpajakan merupakan ekspropriasi menurut Pasal 7 (Ekspropriasi) atau apakah Pasal 9 (Transfer) telah dilanggar. Setiap pengadilan arbitrase yang dapat dibentuk sesuai dengan Bab III, Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak lainnya) untuk mempertimbangkan tindakan perpajakan, wajib menerima keputuan pejabat yang berwenang sebagai keputusan yang mengikat berdasarkan Ayat ini.

   Jika pejabat yang berwenang dari Para Pihak gagal untuk menentukan apakah tindakan perpajakan merupakan ekspropriasi menurut Pasal 7 (Ekspropriasi) atau apakah Pasal 9 (Transfer) telah dilanggar dalam waktu

360 hari sejak tanggal diterimanya permintaan konsultasi oleh Pihak yang tidak bersengketa, penanam modal dapat mengajukan gugatannya ke arbitrase berdasarkan Pasal 19 (Pengajuan Gugatan).

5. Dalam menilai apakah suatu tindakan yang berkaitan dengan perpajakan merupakan ekspropriasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   (a) pengenaan pajak pada umumnya bukan merupakan ekspropriasi. Pengenalan tindakan perpajakan baru atau pengenaan pajak di lebih dari satu yurisdiksi sehubungan dengan penanaman modal, tidak dengan sendirinya merupakan ekspropriasi;

   (b) kegiatan penegakan hukum perpajakan termasuk penyitaan harta kekayaan untuk tujuan pemungutan pajak pada umumnya tidak merupakan ekspropriasi;

   (c) tindakan perpajakan yang konsisten dengan kebijakan, prinsip, dan praktik perpajakan yang diakui secara internasional pada umumnya bukan merupakan ekspropriasi. Secara khusus, tindakan perpajakan yang ditujukan untuk mencegah penghindaran atau penghilangan pajak tidak boleh dianggap sebagai ekspropriasi; dan

   (d) tindakan perpajakan yang diterapkan atas dasar non-diskriminatif, sebagai lawan yang ditargetkan pada penanam modal dari negara tertentu atau wajib pajak orang pribadi tertentu, tidak mungkin merupakan ekspropriasi. Suatu tindakan perpajakan tidak boleh merupakan ekspropriasijika, ketika penanaman modal dilakukan, itu sudah berlaku dan informasi tentang tindakan itu diumumkan kepada publik atau dengan cara lain tersedia untuk umum.

6. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan konvensi perpajakan mana pun. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dan setiap

konvensi perpajakan, konvensi tersebut wajib berlaku sejauh ketidakkonsistenan tersebut. Pejabat yang berwenang di bawah konvensi itu akan memiliki tanggung jawab tunggal untuk menentukan apakah ada ketidakkonsistenan antara Persetujuan ini dan konvensi dimaksud.

7. Untuk tujuan Pasal ini:

(a) "konvensi perpajakan" dalam Butir 6 adalah suatu konvensi untuk penghindaran pajak berganda atau perjanjian atau pengaturan perpajakan internasional lainnya dimana Para Pihak merupakan pihak;

(b) "pejabat yang berwenang" dalam Butir 4 berarti:

(i) sehubungan dengan Indonesia, Menteri Keuangan atau perwakilannya yang sah;

(ii) sehubungan dengan Swiss, Kepala Departemen Keuangan Federal, atau perwakilannya yang sah.

BAB II
PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL

PASAL 4
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

1. Setiap Pihak wajib memberikan perlakuan yang adil dan seimbang serta perlindungan penuh dan keamanan terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lain dalam wilayahnya.

2. Suatu/Satu Pihak melanggar kewajiban perlakuan yang adil dan seimbang dalam ayat 1 jika suatu tindakan atau serangkaian tindakan berupa:

   (a) suatu penyangkalan keadilan dalam proses tindak pidana, perdata atau administrasi;

   (b) suatu pelanggaran mendasar dalam proses penegakan hukum, termasuk pelanggaran mendasar dari transparansi, dalam proses hukum dan administrasi;

   (c) wujud kesewenang-wenangan;

   (d) diskriminasi yang ditargetkan berdasarkan alasan yang salah, seperti gender, ras, atau keyakinan agama; atau

   (e) perlakuan kasar, seperti koersi, paksaan atau pelecehan.

3. Para Pihak wajib, berdasarkan permohonan dari salah satu Pihak, meninjau isi kewajiban guna memberikan perlakuan yang adil dan merata, sesuai dengan prosedur perubahan yang diatur dalam Pasal 44 (Mulai Berlaku, Durasi dan Pengakhiran), khususnya, apakah perlakuan selain yang

tercantum dalam ayat 2 juga merupakan pelanggaran perlakuan yang adil dan seimbang.

4. Perlindungan penuh dan keamanan mensyaratkan masing-masing Pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk memastikan keamanan dan perlindungan penanaman modal.

5. Ketika menerapkan kewajiban perlakuan yang adil dan merata di atas, panel arbitrase dapat mempertimbangkan apakah suatu Pihak membuat komitmen tertulis khusus kepada penanam modal untuk mendorong penanaman modal, yang menciptakan harapan yang sah, dan yang menjadi dasar penanam modal dalam memutuskan untuk membuat atau mempertahankan penanaman modal tersebut, tetapi kemudian diurungkan oleh Pihak tersebut.

6. Adanya fakta bahwa salah satu Pihak mengambil atau gagal mengambil Tindakan yang tidak konsisten terhadap ekspektasi penanam modal tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal ini, walaupun terdapat kehilangan atau kerugian terhadap penanaman modal sebagai akibatnya.

7. Ketetapan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan lain dari Persetujuan ini ataupun dari perjanjian internasional lain yang terpisah, tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini.

PASAL 5
PERLAKUAN NASIONAL

1. Setiap Pihak di wilayahnya wajib memberikan kepada penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikannya, dalam keadaan serupa[7], terhadap penanaman modal oleh penanam modalnya sendiri.[8]

2. Setiap Pihak di wilayahnya wajib memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain, sehubungan dengan pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, penikmatan, perpanjangan, atau pelepasan penanam modal mereka, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada penanam modalnya sendiri.

3. Untuk kepastian, perlakuan yang diberikan oleh salah satu Pihak dalam ayat 1 dan ayat 2 diartikan, terkait dengan pemerintah daerah, perlakuan yang tidak kurang menguntungkannya dibanding perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, dalam keadaan serupa, oleh pemerintah daerah dimaksud ke penanam modal, dan ke penanaman modal oleh penanam modal, dari Pihak yang menjadi bagiannya.

---

[7] Untuk memperkuat kepastian, apakah sebuah perlakuan diberikan dalam konteks "kondisi serupa" pada Pasal 5 (Perlakuan Nasional), atau Pasal 6 (Perlakuan *Most Favoured Nation*) tergantung pada keseluruhan kondisi, termasuk sektor ekonomi atau bisnis yang relevan atau sektor-sektor yang bersangkutan dan apakah perlakuan terkait membedakan antara penanaman modal berdasarkan pada tujuan kesejahteraan umum yang sah.

[8] Untuk memperkuat kepastian, Pasal ini tidak berlaku untuk tindakan apapun yang berkaitan dengan divestasi penanaman modal di mana penanam modal asing diberitahukan, pada tanggal atau pada saat pendaftaran penanaman modal mereka, bahwa penanaman modal mereka akan didivestasikan di masa depan sesuai dengan undang-undang domestik Pihak tuan rumah.

PASAL 6

PERLAKUAN *MOST-FAVOURED NATION*

1. Setiap Pihak di wilayahnya wajib memberikan kepada penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikannya, dalam keadaan serupa, terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari non-Pihak manapun.

2. Setiap Pihak di wilayahnya wajib memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain, sehubungan dengan pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, penikmatan, perpanjangan atau pelepasan penanaman modal mereka, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada penanam modal dari non-Pihak manapun.

3. Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tidak meliputi:

   (a) perjanjian penanaman modal bilateral atau regional yang telah ditandatangani atau yang sudah berlaku sebelum Persetujuan ini berlaku;

   (b) pengaturan dengan non-Pihak yang berada dalam satu kawasan geografis yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama regional dalam bidang ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, industri atau keuangan dalam kerangka kerja proyek yang spesifik.

   (c) Perjanjian yang menetapkan suatu kawasan perdagangan bebas, suatu serikat pabean atau suatu pasar bersama menurut perlakuan istimewa oleh suatu Pihak kepada penanam modal dari Negara ketiga manapun, baik yang telah ada maupun yang akan ada;

(d) Perjanjian tentang penghindaran pajak berganda atau konvensi pajak lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

4. Untuk memperkuat kepastian, ayat 1 dan 2 wajib tidak berlaku untuk prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang tersedia dalam perjanjian internasional lainnya, dan wajib tidak ditafsirkan sebagai pemberian kepada penanam modal prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa selain sebagaimana tercantum dalam Bagian Satu (Penyelesaian Sengketa antara satu Pihak dengan Penanam Modal dari Pihak lainnya) dari Bab III (Penyelesaian Sengketa).

5. Untuk memperkuat kepastian, kewajiban substantif dalam perjanjian penanaman modal internasional lain yang disusun oleh suatu Pihak tidak dengan sendirinya merupakan perlakuan *most-favoured nation* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dan dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atas Pasal ini, sepanjang tidak terdapat tindakan yang telah diadopsi atau dipertahankan oleh suatu Pihak untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

PASAL 7
EKSPROPRIASI

1. Tidak ada Pihak yang dapat mengekspropriasi atau menasionalisasi penanaman modal oleh penanam modal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan yang memiliki akibat setara dengan ekspropriasi atau nasionalisasi (selanjutnya disebut ekspopriasi), kecuali:

(a) untuk tujuan kepentingan umum;

(b) dilakukan tanpa diskriminasi;

(c) dengan pembayaran kompensasi yang tepat waktu, memadai dan efektif sesuai dengan ayat 3 dan 4;

(d) sesuai dengan proses penegakan hukum yang benar dan adil .

Ayat ini wajib diinterpretasikan berdasarkan Lampiran A (Ekspropriasi).

2. Berdasarkan permohonan penanam modal, tindakan ekspopriasi atau penilaian dapat ditinjau ulang oleh peradilan atau otoritas independen lainnya dari Pihak yang melakukan tindakan ekspropriasi dengan memperhatikan hukum yang berlaku.

3. Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(c) wajib:

(a) dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya[9];

(b) setara dengan nilai pasar yang adil[10] dari penanaman modal yang dieksproriasi sesaat sebelum ekspropriasi terjadi (tanggal ekspropriasi) atau sebelum ekspropriasi dimaksud diketahui umum, mana saja yang lebih awal;

(c) tidak merefleksikan perubahan apapun dalam nilai yang terjadi karena ekspropriasi yang akan dilakukan telah diketahui lebih awal;

(d) dapat dilaksanakan secara efektif, bebas digunakan dan bebas dipindah-tangankan sesuai dengan Pasal 9 (Transfer).

4. Jumlah kompensasi wajib mencakup bunga dengan nilai pasar yang wajar, dari tanggal ekspropriasi sampai tanggal pembayaran. Kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai pasar yang wajar mencakup nilai

---

[9] Para Pihak memahami bahwa mungkin terdapat proses hukum dan administratif yang perlu dicermati sebelum pembayaran dapat dilakukan.

[10] Pengukuran nilai pasar yang wajar dari penanaman modal wajib mengecualikan keuntungan spekulatif atau mengada-ada yang digugat oleh penanam modal.

perusahaan yang berjalan, nilai aset termasuk pajak dari properti berwujud serta kriteria lain, sebagaimana mestinya.

5. Tanpa mengesampingkan ayat 1, 3, dan 4, setiap tindakan eksproriasi yang berkaitan dengan tanah, yang ditentukan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan Pihak yang melakukan eksproriasi, wajib dilakukan untuk tujuan umum dan setelah pembayaran kompensasi pada nilai pasar yang adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

6. Pasal ini tidak berlaku terhadap penerbitan lisensi wajib yang diberikan sehubungan dengan hak kekayaan intelektual, atau terhadap pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejauh penerbitan, pencabutan, pembatasan atau penciptaan tersebut sesuai dengan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dalam lampiran 1C, Perjanjian WTO.[11]

PASAL 8
GANTI KERUGIAN

1. Penanam modal dari salah satu Pihak yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, gangguan sipil, situasi negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan, huru hara atau keadaan serupa lainnya di wilayah Pihak lainnya tersebut, wajib diberikan oleh Pihak dimana penanaman modal berada, suatu restitusi, indemnifikasi, kompensasi, atau penyelesaian lainnya, jika ada, jumlah yang tidak kurang dari yang diberikan oleh Pihak dimana penanaman modal berada kepada penanam modal dari

[11] Untuk kepastian, istilah "pencabutan" hak kekayaan intelektual mencakup pembatalan atau penghapusan hak-hak dimaksud, dan istilah "pembatasan' hak kekayaan intelektual mencakup pengecualian hak-hak tersebut.

negara bukan Pihak atau kepada penanam modalnya sendiri, pilihan mana yang lebih menguntungkan.

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, penanam modal dari suatu Pihak yang, dalam suatu situasi sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, mengalami kerugian di wilayah Pihak lain yang diakibatkan oleh:

   (a) Pengambilalihan penanaman modal atau bagiannya oleh Angkatan atau otoritasnya; atau

   (b) Pemusnahan penanaman modal atau bagiannya oleh kekuatan atau otoritasnya yang tidak sesuai dengan situasi mendesak,

   wajib diberikan restitusi atau kompensasi oleh Pihak lain. Dalam hal kompensasi, nilainya tidak melebihi kerugian yang diderita.

PASAL 9
TRANSFER

1. Setiap Pihak wajib mengizinkan semua transfer yang berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain di wilayahnya agar dapat dilakukan secara bebas dan tanpa penundaan ke dalam dan ke luar wilayahnya. Transfer tersebut meliputi:

   (a) kontribusi modal, termasuk kontribusi awal, keuntungan, keuntungan modal, dividen, royalti, bantuan teknis, biaya teknis dan manajemen, bunga dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari penanaman modal;

   (b) hasil penjualan baik seluruh maupun sebagian penanaman modal ataupun likuidasi dari penanaman modal;

(c) pembayaran yang dibuat berdasarkan kontrak, dibuat oleh penanam modal, atau penanaman modalnya, termasuk pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman;

(d) pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 7 (Ekspropriasi) dan Pasal 8 (Ganti Kerugian);

(e) penghasilan dan imbalan dari personel yang diperkerjakan dari luar negeri sehubungan dengan penanaman modal tersebut; dan

(f) pembayaran yang dilakukan berdasarkan Bab III (Penyelesaian Sengketa).

2. Kecuali disepakati lain dengan penanam modal, setiap Pihak wajib mengizinkan transfer dimaksud dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas pada kurs pasar yang berlaku pada saat transfer.

3. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak menerapkan dengan cara yang adil, tidak diskriminatif dan dengan itikad baik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan:

(a) kepailitan, insolvensi, atau perlindungan hak-hak kreditur;

(b) penerbitan, perdagangan, atau transaksi sekuritas, *futures, options* atau turunannya;

(c) kejahatan atau tindak pidana;

(d) laporan keuangan atau pencatatan transfer bila diperlukan untuk membantu penegakan hukum ataupun otoritas pengatur keuangan;

(e) memastikan kepatuhan terhadap perintah ataupun keputusan dalam proses peradilan atau administratif;

(f) jaminan sosial, pensiun publik, atau skema tabungan wajib;

(g) hak pesangon karyawan; atau

(h) perpajakan.

4. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban anggota Dana Moneter Internasional di bawah Akta Pendirian Dana Moneter Internasional, termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan Akta Pendirian Dana Moneter Internasional.

5. Transfer wajib dianggap telah dilakukan 'tanpa penundaan' jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasa diperlukan untuk penyelesaian formalitas transfer, yang diberlakukan oleh bank sentral dan otoritas terkait lainnya dari suatu Pihak. Jangka waktu tersebut dimulai pada hari permintaan transfer diajukan dan tidak boleh melebihi dua bulan. Formalitas tersebut berlaku bagi penanam modal tanpa diskriminasi.

PASAL 10
PEMBATASAN UNTUK PENGAMANAN NERACA PEMBAYARAN

1. Dalam hal suatu Pihak berada dalam permasalahan neraca pembayaran serius dan kesulitan keuangan eksternal atau ancaman dari padanya, atau jika, dalam keadaan luar biasa, pembayaran dan pergerakan modal menyebabkan atau mengancam akan menimbulkan kesulitan serius bagi pengelolaan makroekonomi, khususnya, kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar, salah satu Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan

pembatasan terhadap pembayaran, atau pergerakan modal yang terkait dengan penanaman modal.

2. Pembatasan yang disebut dalam ayat 1 wajib:

(a) sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional;

(b) menghindari kerugian yang tidak perlu terkait kepentingan komersil, ekonomi, dan finansial dari Pihak lainnya;

(c) tidak melebihi batasan yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang digambarkan dalam ayat 1;

(d) bersifat sementara dan dihentikan secara progresif seiring dengan perbaikan situasi yang disebutkan dalam ayat 1;

(e) diterapkan berdasarkan perlakuan nasional;

(f) memastikan bahwa Pihak lainnya diperlakukan sama baiknya dengan non-Pihak mana pun; dan

(g) tidak membatasi pembayaran atau transfer untuk transaksi saat ini, kecuali pengenaan tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional.

PASAL 11
SUBROGASI

1. Jika suatu Pihak, atau suatu agensi, institusi, badan hukum atau korporasi lainnya yang ditunjuk oleh satu Pihak, melakukan pembayaran kepada

penanam modal Pihak tersebut menurut jaminan, kontrak asuransi atau bentuk ganti rugi (*indemnity*) lainnya yang diberikannya dengan risiko non-komersial sehubungan dengan suatu penanaman modal, maka Pihak lainnya yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya penanaman modal wajib mengakui subrogasi atau pemindahan hak apa pun yang dimiliki oleh penanam modal menurut Persetujuan ini sehubungan dengan penanaman modal yang dilindungi tersebut tetapi untuk subrogasi, dan penanam modal tersebut wajib dikesampingkan dari penuntutan hak-hak ini sejauh subrogasi tersebut.

2. Hak atau klaim yang disubrogasikan atau dipindahkan tidak boleh lebih besar dari hak atau klaim awal penanam modal.

PASAL 12
HAK MENGATUR

1. Untuk tujuan Persetujuan ini, Para Pihak menegaskan hak mereka untuk mengatur dalam wilayahnya yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang sah, seperti perlindungan atas kesehatan publik, pelayanan sosial, pendidikan, keselamatan, lingkungan dan moral publik, perlindungan sosial atau konsumen, privasi dan perlindungan data, serta peningkatan dan perlindungan keragaman budaya.

2. Untuk memperkuat kepastian, fakta bahwa satu Pihak mengatur, termasuk melalui perubahan peraturan perundang-undangannya, yang memberikan dampak negatif terhadap penanaman modal atau mempengaruhi ekspektasi penanam modal, termasuk ekspektasi keuntungan, tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban dalam Persetujuan ini.

PASAL 13
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Masing-masing Pihak wajib mendorong badan hukum yang beroperasi di wilayahnya atau tunduk pada yurisdiksinya untuk secara sukarela memasukkan dalam kebijakan internal mereka standar yang diakui secara internasional, pedoman, dan prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial perusahaan yang telah disahkan atau didukung oleh Pihak tersebut.

PASAL 14
TINDAKAN MELAWAN KORUPSI

1. Penanam modal dari suatu Pihak beserta penanaman modalnya tidak boleh, sebelum melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain atau setelahnya, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan uang atau keuntungan lain yang tidak semestinya, baik secara langsung atau melalui perantara, kepada suatu pejabat publik dari Pihak lain untuk pejabat tersebut atau untuk pihak ketiga, agar pejabat atau pihak ketiga dimaksud bertindak atau menahan diri untuk bertindak sehubungan dengan pelaksanaan tugas resmi, untuk mendapatkan keuntungan apapun sehubungan dengan suatu penanaman modal.

2. Penanam modal dari suatu Pihak beserta penanaman modalnya, di wilayah Pihak lainnya, tidak boleh terlibat dalam Tindakan apa pun sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1, termasuk hasutan dan membantu untuk melakukan tindakan tersebut.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA

BAGIAN SATU
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA SATU PIHAK DENGAN PENANAM MODAL DARI PIHAK LAINNYA

PASAL 15
RUANG LINGKUP

1. Bagian ini wajib berlaku untuk sengketa antara satu Pihak dengan penanam modal dari Pihak lainnya ("pihak yang bersengketa") terkait dengan dugaan pelanggaran atas suatu kewajiban berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi penanam modal (untuk selanjutnya disebut "sengketa penanaman modal").

2. Bagian ini wajib tidak berlaku bagi sengketa penanaman modal, yang timbul sebelum tanggal berlakunya Persetujuan ini.

3. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan suatu Pihak tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap Pihak tersebut berdasarkan Bagian ini.

4. Suatu Badan Hukum dari suatu Pihak dan anak perusahaannya tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap Pihak lainnya berdasarkan Bagian ini, jika badan hukum tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh penanam modal non-Pihak, dan Pihak lain tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan non-Pihak.

PASAL 16
TRANSPARANSI PERSIDANGAN ARBITRASE

1. Berdasarkan ayat 2, pihak yang bersengketa wajib mempublikasikan semua putusan dan penetapan yang dihasilkan oleh panel arbitrase.

2. Informasi apapun yang secara khusus ditentukan sebagai informasi rahasia yang telah diserahkan kepada panel arbitrase atau para pihak yang bersengketa wajib dilindungi agar tidak diungkapkan ke publik.

3. Setiap pihak yang bersengketa yang bermaksud menggunakan informasi yang ditetapkan sebagai informasi rahasia di dalam sidang dengar pendapat wajib memberitahukan maksudnya kepada panel arbitrase. Panel arbitrase wajib membuat pengaturan yang tepat untuk melindungi informasi agar tidak diungkapkan.

4. Sidang dengar pendapat panel arbitrase wajib tertutup selama diskusi atas informasi rahasia. Selain dari itu, sidang dengar pendapat wajib terbuka untuk umum, kecuali para pihak yang sengketa memutuskan sebaliknya.

5. Panel tribunal tidak boleh mewajibkan suatu pihak yang bersengketa untuk memberikan informasi bisnis atau informasi rahasia yang apabila diungkapkan akan menghambat penegakan hukum atau akan bertentangan dengan hukum, atau yang dianggap bertentangan dengan keamanan dasar dari pihak yang bersengketa, atau yang akan merugikan kepentingan komersial yang sah dari badan hukum tertentu, publik atau swasta.

PASAL 17
KONSULTASI

1. Dalam hal terjadi sengketa penanaman modal, para pihak yang bersengketa terlebih dahulu wajib berusaha menyelesaikan sengketa tersebut dengan maksud untuk mencapai penyelesaian secara damai melalui konsultasi. Konsultasi tersebut wajib dimulai dengan permintaan tertulis untuk diadakannya konsultasi yang disampaikan oleh penanam modal yang bersengketa kepada Pihak yang bersengketa.

2. Dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui konsultasi, maka permintaan konsultasi secara tertulis wajib memuat informasi mengenai dasar hukum dan fakta yang sebenarnya dari sengketa penanaman modal tersebut, termasuk nama dan alamat penanam modal yang bersengketa, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini yang diduga telah dilanggar, upaya pemulihan, perkiraan jumlah ganti rugi yang diklaim, dan bukti yang menetapkan bahwa penanam modal yang bersengketa adalah penanam modal dari Pihak lain dan bahwa ia memiliki atau mengendalikan penanaman modal tersebut.

PASAL 18
MEDIASI

1. Jika sengketa penanaman modal tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi, pihak yang bersengketa dapat meminta pihak yang bersengketa lainnya untuk menggunakan prosedur pihak ketiga yang tidak mengikat, seperti jasa baik, konsiliasi atau mediasi. Proses tersebut wajib dimulai dengan permintaan tertulis yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa kepada pihak yang bersengketa lainnya dan memerlukan persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa.

2. Proses berdasarkan Pasal ini hanya dapat dimulai oleh pihak yang bersengketa dalam waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis untuk konsultasi tertulis oleh Pihak yang bersengketa.

3. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses berdasarkan Pasal ini wajib ditanggung bersama secara merata oleh para pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menanggung biayanya sendiri yang berasal dari keikutsertaan dalam proses tersebut.

PASAL 19
PENGAJUAN GUGATAN

1. Jika sengketa penanaman modal tidak dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal penyampaian permohonan tertulis untuk konsultasi oleh Pihak yang bersengketa, kecuali ditentukan lain oleh para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa dapat atas namanya sendiri atau atas nama perusahaan yang didirikan secara lokal[12], mengajukan sengketa ke pengadilan atau pengadilan administratif dari Pihak yang bersangkutan atau arbitrase internasional. Dalam peristiwa terakhir, penanam modal yang bersengketa memiliki pilihan antara salah satu dari aturan berikut:

   (a) Arbitrase berdasarkan Konvensi ICSID dan Peraturan Arbitrase ICSID, sepanjang kedua belah pihak baik Pihak yang bersengketa maupun Pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada Konvensi ICSID;

   (b) Arbitrase berdasarkan fasilitas tambahan ICSID, sepanjang kedua belah pihak baik Pihak yang bersengketa atau Pihak dari penanam modal yang bersengketa merupakan pihak pada Konvensi ICSID;

[12] Untuk memperkuat kepastian, suatu perusahaan tidak dapat dengan sendirinya menyampaikan gugatan terhadap Pihak dimana perusahaan didirikan.

(c) Arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase UNCITRAL; atau

(d) Lembaga arbitrase lainnya atau berdasarkan peraturan arbitrase lainnya, jika para pihak yang bersengketa menyetujui hal tersebut.

2. Jika ada pertentangan antara ketentuan Persetujuan ini dan ketentuan aturan arbitrase yang berlaku, ketentuan Persetujuan ini akan berlaku sejauh ketidakkonsistenan tersebut.

3. Masing-masing Pihak dengan ini menyetujui pengajuan sengketa ke arbitrase berdasarkan ayat 1 sesuai dengan ketentuan Bagian ini, dengan syarat persyaratan untuk pengajuan tersebut ditentukan dalam Pasal ini.

4. Persetujuan dalam ayat 3dan pengajuan suatu gugatan kepada arbitrase dalam Bagian ini wajib memenuhi persyaratan:

(a) Bab II Konvensi ICSID (Yurisdiksi ICSID) dan Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID untuk persetujuan tertulis para pihak dalam sengketa; dan

(b) Pasal II Konvensi New York untuk "persetujuan tertulis".

5. Penanam modal yang bersengketa hanya dapat mengajukan gugatan ke arbitrase apabila penanam modal yang bersengketa secara kumulatif:

(a) memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang bersengketa tentang niatnya untuk mengajukan sengketa ke arbitrase tersebut setidaknya 90 hari sebelum gugatan diajukan, yang berisi informasi mengenai dasar hukum dan dasar faktual dari sengketa penanaman modal yang diberikan oleh penanam modal yang bersengketa di

permohonannya untuk konsultasi beserta setiap perubahan informasi di dalamnya;

(b) memberikan kepada Pihak yang bersengketa, bersamaan dengan pengajuan gugatan, persetujuannya untuk penyelesaian sengketa dalam arbitrase sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Bagian ini;

(c) tidak mengidentifikasi tindakan dalam klaimnya yang tidak diidentifikasi dalam permohonan konsultasinya;

(d) menarik atau menghentikan setiap proses yang ada di hadapan tribunal atau pengadilan berdasarkan hukum domestik atau internasional sehubungan dengan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran yang dirujuk dalam klaimnya; dan

(e) melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan atau memulai proses apapun di hadapan tribunal atau pengadilan berdasarkan hukum domestik atau internasional sehubungan dengan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran yang dirujuk dalam klaimnya.

Huruf (d) dan (e) di atas tidak berlaku untuk ganti rugi, deklaratif atau upaya hukum non-uang lainnya asalkan tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan tunggal melestarikan hak dan kepentingan penanam modal atau perusahaan yang bersengketa selama menunggu arbitrase.

6. Suatu gugatan dapat diajukan ke arbitrase berdasarkan Bab ini hanya jika tidak ada putusan final mengenai perlakuan yang sama sebagaimana dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Bab II (Perlindungan Penanaman Modal) yang telah dijatuhkan dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penanam modal yang bersengketa kepada panel arbitrase lainnya yang dibentuk berdasarkan Bagian ini, atau perjanjian lainnya, termasuk pelindungan penanaman modal.

7. Dalam hal penanam modal belum mengajukan sengketanya ke arbitrase internasional sesuai dengan ayat 1 dalam waktu 24 bulan sejak tanggal diterimanya oleh Pihak yang bersengketa permintaan konsultasi secara tertulis, penanam modal dianggap telah menarik permohonannya untuk konsultasi dan tidak dapat lagi mengajukan sengketa yang sama ke arbitrase internasional sesuai dengan ayat 1. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis antara para pihak yang bersengketa sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

8. Persetujuan Para Pihak untuk pengajuan sengketa ke arbitrase berdasarkan ayat 1 sesuai dengan ketentuan Bagian ini, harus tunduk pada syarat bahwa sengketa penanaman modal diajukan dalam waktu lima tahun sejak penanam modal yang bersengketa mengetahui, atau seharusnya menyadari secara wajar, pelanggaran kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada penanam modal yang bersengketa atau penanaman modalnya. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

PASAL 20
PENDANAAN PIHAK KETIGA

1. Para pihak yang bersengketa wajib menyampaikan pemberitahuan kepada panel arbitrase perihal nama dan alamat pihak ketiga jika para pihak yang bersengketa didanai oleh pihak ketiga.

2. Pemberitahuan tersebut wajib dibuat saat pengajuan gugatan, atau tanpa penundaan seketika setelah pendanaan oleh pihak ketiga tersebut disepakati, didonasikan, atau disetujui, sebagaimana berlaku.

3. Jika para pihak yang bersengketa gagal mengungkapkan dana pihak ketiga berdasarkan Pasal ini, panel arbitrase dapat mempertimbangkan perilaku para pihak yang bersengketa sebagai faktor dalam mengalokasikan biaya atau memerintahkan penangguhan atau penghentian proses.

PASAL 21
PEMBENTUKAN PANEL ARBITRASE

1. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak yang bersengketa, panel arbitrase wajib terdiri dari tiga arbiter, yang bukan warga negara atau penduduk tetap kedua belah Pihak. Masing-masing pihak yang bersengketa wajib menunjuk satu arbiter dan para pihak yang bersengketa wajib menyetujui arbiter ketiga, yang akan menjadi ketua panel arbiter. Ketua panel arbiter wajib merupakan warga negara dari non-Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pihak yang bersengketa maupun Pihak yang tidak bersengketa.

2. Jika panel arbiter tidak dapat dibentuk dalam waktu 90 hari sejak tanggal pengajuan gugatan arbitrase, baik karena salah satu pihak yang bersengketa gagal menunjuk arbiter atau karena para pihak yang bersengketa gagal menunjuk ketua panel, Sekretaris Jenderal ICSID, melalui permohonan salah satu pihak yang bersengketa, wajib menunjuk, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. Jika Sekretaris Jenderal ICSID merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, atau tidak mampu menunjuk arbiter, Deputi Sekretaris Jenderal ICSID, yang bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap salah satu Pihak, dapat diminta untuk melakukan penunjukan tersebut

3. Para arbiter wajib memiliki pengalaman dan keahlian dalam hukum publik internasional, hukum penanaman modal internasional, atau penyelesaian sengketa yang timbul dari hukum penanaman modal internasional. Para

Arbiter wajib independen dari Para Pihak dan penanam modal yang bersengketa dan tidak berafiliasi atau menerima instruksi dari mereka.

4. Jika arbiter yang ditunjuk sesuai Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya, seorang pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti yang ditentukan untuk penunjukan arbiter awal, dan ia wajib memegang kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter awal.

5. Para Arbiter yang ditunjuk dalam Bagian ini wajib mematuhi Kode Perilaku Arbiter sebagaimana tercantum dalam Lampiran B dari Persetujuan ini.

PASAL 22
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENAFSIRAN

1. Panel arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Pasal 21 (Pembentukan Panel Arbitrase) wajib menentukan isu dari sengketa berdasarkan ketentuan Persetujuan ini yang ditafsirkan sesuai dengan peraturan hukum internasional yang berlaku. Selain itu, Panel Arbitrase dapat menerapkan aturan-aturan hukum internasional lainnya dan aturan-aturan hukum domestik bilamana sesuai dengan isu-isu yang diselesaikan.

2. Apabila timbul kekhawatiran sehubungan dengan masalah interpretasi dari suatu ketentuan Perjanjian, Para Pihak dapat mengadopsi penafsiran bersama. Penafsiran bersama dari ketentuan masing-masing akan mengikat panel arbitrase yang dibentuk berdasarkan Bab ini. Para Pihak dapat memutuskan bahwa penafsiran bersama ini akan mengikat sejak tanggal tertentu.

PASAL 23
TEMPAT ARBITRASE

Kecuali disetujui sebaliknya oleh para pihak yang bersengketa, panel arbitrase wajib menentukan tempat arbitrase berdasarkan peraturan arbitrase yang berlaku, sepanjang tempat tersebut berada dalam wilayah suatu Negara yang merupakan pihak dalam Konvensi New York.

PASAL 24
PROSES ARBITRASE

1. Apabila masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi atau kelayakan diajukan sebagai keberatan pendahuluan, panel arbitrase harus memutuskan masalah tersebut sebelum melanjutkan ke pokok perkara.

2. Pihak yang bersengketa dapat, selambat-lambatnya 45 hari setelah pembentukan panel arbitrase, mengajukan keberatan pendahuluan bahwa suatu gugatan dikecualikan menurut Pasal 15 (Ruang Lingkup). Pihak yang bersengketa juga dapat mengajukan keberatan bahwa suatu gugatan berada di luar yurisdiksi atau kompetensi panel arbitrase atau keberatan lainnya, misalnya, bahwa suatu gugatan adalah keliru atau secara nyata tanpa dasar hukum, meskipun apabila fakta yang dituduhkan diasumsikan benar. Pihak yang bersengketa wajib menentukan secara rinci kemungkinan dasar keberatan. Hal ini tanpa mengurangi kemampuan Pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan tersebut pada tahap selanjutnya dalam proses persidangan.

3. Panel arbitrase wajib menjawab setiap keberatan tersebut sebagai pertanyaan pendahuluan selain dari pokok perkara. Para pihak yang bersengketa wajib diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pandangan dan pengamatan mereka kepada panel arbitrase. Jika panel arbitrase memutuskan bahwa gugatan dikecualikan berdasarkan Pasal 15 (Ruang Lingkup), atau sebaliknya tidak berada dalam yurisdiksi atau

kompetensi panel arbitrase atau jika panel arbitrase menerima keberatan lainnya, panel arbitrase wajib memberikan putusan atau keputusan terhadapnya.

4. Panel arbitrase wajib memutuskan berdasarkan prinsip percepatan setiap keberatan pendahuluan yang diajukan berdasarkan Pasal ini. Panel arbitrase akan menangguhkan setiap proses pokok perkara dan mengeluarkan keputusan atau putusan atas keberatan, menyatakan alasan terhadapnya, selambat-lambatnya 150 hari setelah tanggal permohonan. Namun, jika Pihak yang bersengketa memohonkan pemeriksaan, panel arbitrase dapat mengambil 30 hari tambahan untuk mengeluarkan keputusan atau putusan. Terlepas dari apakah suatu sidang dengar pendapat diminta, panel dapat, dengan menunjukkan penyebab yang luar biasa, menunda penerbitan keputusan atau putusannya dengan tambahan waktu yang singkat, yang tidak boleh melebihi 30 hari.

PASAL 25
PERLINDUNGAN DIPLOMATIK

Tidak ada Pihak manapun yang wajib memberikan perlindungan diplomatik, atau mengajukan gugatan internasional, terhadap suatu sengketa dimana salah satu penanam modalnya atau Pihak lainnya wajib memberikan persetujuan untuk pengajuan atau telah mengajukan ke arbitrase menurut Bagian ini, kecuali Pihak lainnya tersebut telah gagal untuk memenuhi atau mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam sengketa tersebut. Perlindungan diplomatik, untuk tujuan Pasal ini, wajib tidak mencakup pertukaran diplomatik informal semata-mata untuk tujuan memfasilitasi penyelesaian sengketa.

PASAL 26
PUTUSAN

1. Ketika suatu panel arbitrase menjatuhkan putusan final terhadap Pihak yang bersangkutan, panel arbitrase dapat memutuskan, secara terpisah atau dalam kombinasi, hanya:

   (a) kerugian moneter dan setiap bunga yang berlaku; dan

   (b) restitusi properti, dengan ketentuan bahwa tergugat dapat membayar ganti rugi moneter dan setiap bunga yang berlaku, yang mewakili nilai pasar yang wajar dari properti pada saat segera sebelum ekspropriasi atau ekspropriasi yang akan datang diketahui, yang mana yang lebih awal, sebagai pengganti restitusi.

2. Panel arbitrase dapat pula memutuskan biaya-biaya persidangan dan biaya pengacara dan bantuan hukum sesuai dengan Bagian ini dan peraturan arbitrase yang berlaku.

3. Panel arbitrase tidak dapat menjatuhkan hukuman punitif.

4. Putusan harus mengikat dan tidak tunduk pada mekanisme peninjauan apa pun selain yang diatur dalam Konvensi ICSID atau aturan arbitrase lain yang berlaku yang menjadi dasar proses arbitrase yang dipilih oleh penanam modal yang bersengketa.

5. Penanam modal yang bersengketa tidak dapat mencari penegakan hukum terhadap putusan akhir hingga:

   (a) Dalam hal terdapat putusan akhir sesuai Konvensi ICSID:

(i) 120 hari telah berlalu sejak putusan dijatuhkan dan tidak ada permintaan dari Pihak yang bersengketa untuk memperbaiki atau membatalkan putusan; atau

(ii) Perbaikan atau pembatalan proses yang telah selesai;

(b) Dalam hal terdapat putusan akhir dalam Peraturan Fasilitas Tambahan ICSID, Peraturan Arbitrase UNCITRAL, atau peraturan-peraturan tertentu sesuai ayat 1(e) Pasal 19 (Pengajuan Gugatan);

(i) 90 hari telah berlalu sejak putusan dijatuhkan dan tidak ada Pihak yang bersengketa telah memulai proses untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan; atau

(ii) suatu pengadilan telah memberhentikan atau memperkenankan permohonan untuk memperbaiki, mengesampingkan, atau membatalkan putusan dan tidak terdapat banding lanjutan.

6. Sesuai dengan ayat 5 dan prosedur peninjauan yang berlaku, para pihak yang bersengketa wajib mematuhi dan mematuhi putusan tanpa penundaan.

PASAL 27
BIAYA-BIAYA

1. Panel arbitrase wajib memerintahkan agar biaya-biaya proses ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang kalah. Dalam keadaan luar biasa, panel arbitrase dapat membagi biaya antara pihak-pihak yang bersengketa jika panel arbitrase menentukan bahwa pembagian tersebut sesuai dengan keadaan kasus tersebut. Biaya wajar lainnya, termasuk biaya representasi dan bantuan hukum, akan ditanggung oleh pihak yang bersengketa yang

kalah, kecuali panel arbitrase menentukan bahwa kontribusi tersebut tidak masuk akal dalam keadaan kasus tersebut. Jika hanya sebagian gugatan yang dikabulkan, biaya-biaya wajib disesuaikan, secara proporsional, terhadap jumlah atau sejauh mana dari bagian gugatan yang dikabulkan.

2. Panel arbitrase harus memastikan bahwa semua keputusan tentang biaya miliki dasar dan merupakan bagian dari putusan.

PASAL 28
JAMINAN TERHADAP BIAYA

1. Atas permintaan pihak yang bersengketa, panel arbitrase dapat memerintahkan pihak yang bersengketa yang mengajukan gugatan atau gugatan balik untuk memberikan jaminan terhadap biaya.

2. Dalam menentukan apakah akan memerintahkan pihak yang bersengketa untuk memberikan jaminan terhadap biaya, panel arbitrase harus mempertimbangkan semua keadaan yang relevan, termasuk:

   (a) kemampuan pihak yang bersengketa untuk mematuhi keputusan yang merugikan tentang biaya;

   (b) kesediaan pihak yang bersengketauntuk mematuhi keputusan yang merugikan mengenai biaya;

   (c) dampak pemberian jaminan terhadap biaya atas kemampuan pihak yang bersengketa untuk mengejar gugatan atau gugatan baliknya; dan

   (d) perilaku para pihak yang bersengketa.

3. Panel arbitrase wajib menetapkan setiap persyaratan yang relevan untuk memberikan jaminan terhadap biaya dan harus menetapkan batas waktu untuk mematuhi terhadap keputusan tersebut.

4. Jika pihak yang bersengketa gagal untuk mematuhi keputusan untuk memberikan jaminan terhadap biaya dalam waktu 30 hari setelah keputusan panel arbitrase atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh panel arbitrase, panel arbitrase dapat menangguhkan persidangan. Jika persidangan ditangguhkan selama lebih dari 90 hari, panel arbitrase dapat, setelah berkonsultasi dengan para pihak yang bersengketa, memerintahkan penghentian persidangan.

5. Pihak yang bersengketa wajib segera mengungkapkan setiap perubahan material dalam keadaan di mana panel arbitrase memerintahkan jaminan terhadap biaya.

6. Panel arbitrase dapat sewaktu-waktu mengubah atau mencabut keputusannya atas jaminan terhadap biaya, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan pihak yang bersengketa.

PASAL 29
KONSOLIDASI

Jika dua atau lebih gugatan telah diajukan secara terpisah ke Arbitrase berdasarkan Pasal 19 (Pengajuan Gugatan) dan gugatan memiliki pertanyaan tentang hukum atau fakta yang sama dan timbul dari peristiwa atau keadaan yang sama atau serupa, semua pihak yang bersengketa dapat menyetujui untuk mengkonsolidasikan gugatan tersebut.

PASAL 30
PENGHENTIAN

Jika, setelah pengajuan gugatan berdasarkan Bagian ini, penanam modal yang bersengketa gagal mengambil langkah apa pun dalam proses dalam kurun 180 hari atau periode tertentu seperti yang disepakati para pihak yang bersengketa, penanam modal yang bersengketa wajib dianggap telah menarik gugatannya dan menghentikan prosesnya. Panel Arbitrase wajib, atas permintaan dari Pihak yang bersengketa, dan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak yang bersengketa, mengeluarkan perintah tentang penghentian proses. Setelah perintah semacam itu diberikan, otoritas panel arbitrase akan berakhir.

PASAL 31
LAYANAN DOKUMEN

1. Pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam Bagian ini wajib disediakan kepada Indonesia dengan pengiriman ke:

   Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
   Kementerian Luar Negeri
   Jalan Taman Pejambon No.6
   Jakarta 10110
   Indonesia

2. Pemberitahuan dan dokumen sengketa lainnya dalam Bagian ini wajib disediakan kepada Swiss dengan pengiriman ke:

   State Secretariat for Economic Affairs SECO
   Holzikofenweg 36
   3003 Bern
   SWITZERLAND

BAGIAN DUA
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PARA PIHAK

PASAL 32
RUANG LINGKUP

Bagian ini berlaku untuk penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.

PASAL 33
KONSULTASI

1. Setiap Pihak dapat secara tertulis menyampaikan permintaan konsultasi tentang penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini. Apabila muncul suatu sengketa antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini, sebisa mungkin, sengketa dimaksud wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi.

2. Dalam hal sengketa dimaksud tidak diselesaikan melalui cara-cara tersebut di atas dalam waktu 6 bulan sejak tanggal permintaan tertulis untuk konsultasi disampaikan, maka, kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, setiap Pihak dapat mengajukan sengketa tersebut ke panel arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Bagian ini atau, dengan persetujuan Para Pihak, ke pengadilan internasional lainnya.

PASAL 34
PEMBENTUKAN PANEL ARBITRASE

1. Proses arbitrase akan dimulai setelah pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh satu Pihak (selanjutnya disebut sebagai "Pihak

Pemohon") kepada Pihak lainnya (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Termohon") melalui saluran diplomatik. Pemberitahuan tersebut wajib mengidentifikasi tindakan khusus yang dipermasalahkan dan memberikan rincian dasar faktual dan hukum dari gugatan (termasuk ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini yang dimintakan untuk ditangani oleh panel arbitrase) yang cukup untuk menjelaskan masalah dengan jelas.

2. Masing-masing Pihak wajib menunjuk satu arbiter, dan kedua arbiter ini wajib menunjuk seorang ketua yang wajib memiliki kewarganegaraan bukan dari suatu negara Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan Para Pihak. Jika salah satu Pihak belum menunjuk arbiternya dan tidak mengikuti undangan Pihak lainnya untuk membuat penunjukan itu dalam waktu dua bulan sejak pemberitahuan arbitrase, arbiter wajib ditunjuk atas permintaan Pihak tersebut oleh Sekretaris Jenderal ICSID . Jika para arbiter tidak dapat menyepakati pemilihan ketua dalam waktu dua bulan sejak penunjukan mereka, ketua harus ditunjuk atas permintaan salah satu Pihak oleh Sekretaris Jenderal ICSID.

3. Jika Sekretaris Jenderal ICSID berhalangan untuk menjalankan fungsi tersebut atau merupakan warga negara dari salah satu Pihak, Presiden *International Court of Justice* akan bertindak sebagai otoritas penunjuk. Jika Presiden *International Court of Justice* berhalangan untuk menjalankan fungsi tersebut atau merupakan warga negara dari salah satu Pihak, penunjukan harus dilakukan oleh Wakil Presiden, dan jika Wakil Presiden berhalangan atau merupakan warga negara dari salah satu Pihak, penunjukan akan dilakukan oleh anggota senior berikutnya dari *International Court of Justice* yang bukan warga negara suatu Pihak.

4. Para arbiter wajib memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang hukum publik internasional dan hukum penanaman modal dan penyelesaian sengketa penanaman modal internasional. Para arbiter wajib independen dari Para Pihak, dan tidak terafiliasi dengan atau menerima instruksi dari salah satu dari mereka.

5. Dalam hal seorang arbiter yang ditunjuk berdasarkan Pasal ini mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya, seorang pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama seperti yang ditentukan untuk penunjukan arbiter terdahulu, dan dia wajib memegang kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter terdahulu.

6. Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuknya dan setiap biaya kuasa hukumnya dalam persidangan. Biaya ketua panel arbitrase dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan arbitrase wajib ditanggung bersama oleh Para Pihak, kecuali panel arbitrase memutuskan lain.

PASAL 35
TEMPAT ARBITRASE

Kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, tempat arbitrase wajib ditentukan oleh panel arbitrase.

PASAL 36
PROSES ARBITRASE

1. Suatu panel arbitrase yang dibentuk berdasarkan Bagian ini wajib memutuskan seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Pihak pemohon dan, merujuk pada kesepakatan apapun antara Para Pihak, menentukan prosedurnya sendiri. Pada setiap tahapan persidangan, panel arbitrase dapat mengusulkan kepada Para Pihak agar perselisihan diselesaikan secara damai.

2. Suatu panel arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Pasal 34 (Pembentukan Panel Arbitrase) wajib memutuskan masalah yang

dipersengketakan berdasarkan ketentuan Persetujuan ini yang ditafsirkan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku. Selain itu, panel arbitrase dapat menerapkan aturan-aturan hukum internasional dan aturan-aturan hukum domestik lainnya yang layak digunakan dalam rangka menyelesaikan masalah dimaksud.

3. Putusan wajib dikeluarkan secara tertulis dan wajib memuat temuan-temuan faktual dan hukum yang berlaku. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak dan terhadap setiap panel arbitrase yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.

BAB IV
KETENTUAN UMUM, PENGECUALIAN AND KETENTUAN FINAL

PASAL 37
KONDISI LEBIH MENGUNTUNGKAN

Jika peraturan perundang-undangan dari salah satu Pihak, atau kewajiban-kewajiban internasional yang berlaku saat ini atau dibentuk setelahnya antara Para Pihak sebagai tambahan dari Persetujuan ini, menyebabkan suatu posisi yang memberikan penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, posisi tersebut wajib tidak dipengaruhi Persetujuan ini.

PASAL 38
PENOLAKAN MANFAAT

1. Suatu Pihak dapat menolak memberikan manfaat Persetujuan ini terhadap seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum Pihak lain dimaksud dan terhadap penanaman modal dari penanam modal dimaksud jika penanam modal dari suatu non-Pihak atau Pihak yang menolak memberikan manfaat memiliki atau mengendalikan badan hukum dan badan hukum tersebut tidak memiliki operasi bisnis yang substantif di wilayah Pihak lain tersebut.

2. Suatu Pihak dapat menolak memberikan manfaat Persetujuan ini terhadap seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum Pihak lain dan terhadap penanaman modal dari penanam modal dimaksud jika perorangan atau perusahaan dari non-Pihak memiliki atau mengendalikan adan hukum dan Pihak yang menolak memberikan manfaat mengadopsi atau mempertahankan Tindakan terkait non-Pihak atau perorangan atau perusahaan non-Pihak tersebut yang berhubungan

dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan melarang transaksi dengan badan hukum atau yang akan melanggar atau membatasi jika manfaat dari Persetujuan ini diberikan kepada badan hukum atau kepada penanaman modalnya.

PASAL 39
TRANSPARANSI

1. Tiap Pihak wajib tanpa menunda-nunda menerbitkan atau menyediakan untuk umum dengan cara sedemikian rupa hukum, peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang dapat mempengaruhi penanaman modal dari penanam modal Pihak lain.

2. Tiap Pihak wajib, berdasarkan permohonan dari Pihak lainnya, menanggapi dalam periode waktu yang wajar terhadap pertanyaan spesifik dan menyediakan informasi kepada Pihak lain sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam ayat 1.

PASAL 40
PENGUNGKAPAN INFORMASI

1. Tanpa mengabaikan Pasal 5 (Perlakuan Nasional), suatu Pihak dapat menyaratkan penanam modal dari Pihak lain, atau penanaman modalnya, untuk menyediakan informasi mengenai penanaman modal dimaksud semata-mata untuk tujuan informasi atau tujuan statistik. Pihak tersebut wajib melindungi informasi bisnis dimaksud yang bersifat rahasia dari setiap pengungkapan yang dapat merugikan posisi kompetitif dari penanaman modal atau penanaman modalnya. Tidak ada dalam ayat ini yang dianggap mencegah suatu Pihak untuk memperoleh atau membuka informasi terkait dengan penerapan hukum yang patut dan beritikad baik.

2. Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang mewajibkan salah satu Pihak untuk menyediakan informasi yang bersifat rahasia untuk diungkap yang dapat menghambat penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum, atau yang dapat merugikan kepentingan umum, atau yang dapat merugikan kepentingan komersial yang sah dari badan hukum tertentu, publik, atau swasta.

PASAL 41
PENGECUALIAN UMUM

Sesuai dengan persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan menjadi saranan kesewenang-wenangan atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan terhadap Pihak lain atau penanam modalnya di mana kondisi serupa yang berlaku, atau pembatasan terselubung atas penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain di wilayah suatu Pihak, tidak ada dalam Persetujuan ini yang ditafsirkan untuk mencegah adopsi atau penegakan suatu Pihak terhadap tindakan yang:

(a) diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum[13];

(b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan;

(c) diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Persetujuan ini termasuk yang berkaitan dengan:

(i) pencegahan praktik penipuan dan kecurangan atau untuk menangani dampak dari wanprestasi dalam suatu kontrak;

[13] Pengecualian ketertiban umum dapat dilakukan apabila ancaman nyata dan sangat serius muncul dan membahayakan kepentingan mendasar masyarakat.

(ii) pelindungan privasi individu dalam kaitannya dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan catatan dan akun individu;

(iii) keselamatan.

(d) dikenakan untuk pelindungan kekayaan nasional dari nilai artistik, bersejarah atau arkeologi; atau

(e) berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan jika Langkah-langkah tersebut dibuat efektif dalam hubungannya dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik.

PASAL 42
TINDAKAN KEHATIAN-HATIAN

1. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mencegah suatu Pihak untuk mengadopsi atau mempertahankan tindakan dengan cara yang tidak diskriminatif terkait dengan jasa keuangan karena alasan kehati-hatian[14], termasuk:

(a) Tindakan untuk melindungi penanam modal, deposan, pemegang polis, penuntut polis, serta pelaku pasar keuangan, atau mereka yang tugas fidusianya dimiliki oleh penyedia jasa keuangan;

(b) untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan suatu Pihak.

---

[14] Para Pihak memahami bahwa istilah '*prudential reasons*' termasuk pemeliharaan keamanan, kekuatan, integritas atau tanggung jawab keuangan dari penyedia jasa keuangan perorangan dan juga keamanan, dan integritas keuangan dan operasional dari pembayaran dan sistem kliring.

2. Tindakan yang diambil oleh suatu Pihak sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib tidak digunakan sebagai sarana untuk menghindari komitmen atau kewajiban Pihak dimaksud berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL 43
PENINGKATAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan, tiap Pihak wajib mengusahakan untuk bekerja sama dalam memfasilitasi penanaman modal antara Para Pihak termasuk melalui:

   (a) menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk semua bentuk penanaman modal;

   (b) menyederhanakan prosedur untuk permohonan dan persetujuan penanaman modal;

   (c) meningkatkan penyebaran informasi terkait penanaman modal, termasuk ketentuan penanaman modal, peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur; dan

   (d) membentuk mekanisme yang sesuai, sejauh mungkin, untuk menyediakan bantuan dan jasa konsultasi kepada penanam modal termasuk fasilitasi dari lisensi operasional dan izin.

2. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, kegiatan kerja sama dalam ayat (1)(d) dapat dibangun berdasarkan persetujuan atau pengaturan yang telah ada untuk kerja sama ekonomi.

3. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang wajib ditafsirkan untuk mempengaruhi kewajiban apapun dalam ketentuan Bab II (Perlindungan

Penanaman Modal), atau tunduk atau sebaliknya mempengaruhi proses penyelesaian sengketa berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL 44
MULAI BERLAKU, DURASI AND PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari diterimanya pemberitahuan kedua melalui saluran diplomatik yang menegaskan bahwa kedua Pihak telah memenuhi persyaratan hukum untuk berlakunya perjanjian internasional.

2. Terlepas dari Pasal 2 (Ruang Lingkup Persetujuan), suatu gugatan dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Persetujuan antara Pemerintah Konfederasi Swiss dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai peningkatan dan perlindungan timbal balik penanaman modal tanggal 6 Februari 1974, yang pengakhirannya berlaku pada tanggal 8 April 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Lama"), sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Lama, dan dengan ketentuan bahwa tidak lebih dari satu tahun telah berlalu sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini.

3. Persetujuan ini dapat diamendemen melalui kesepakatan Bersama oleh Para Pihak secara tertulis. Amandemen wajib mulai berlaku sesuai prosedur hukum yang sama berdasarkan ayat 1.

4. Persetujuan ini wajib berlaku selama satu periode 10 (sepuluh) tahun dan wajib berlaku seterusnya, kecuali, dalam waktu setelah kadaluwarsa dari periode awal 10 (sepuluh) tahun, salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya keinginan untuk menghentikan Persetujuan ini. Pemberitahuan pemberhentian wajib berlaku efektif satu tahun setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya.

5. Dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pemberitahuan pemberhentian Persetujuan ini berlaku efektif, ketentuan Persetujuan ini wajib terus berlaku untuk periode 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal tersebut.

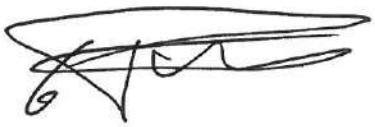
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi wewenang oleh Pemerintah masing-masing untuk menandatangani, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Davos pada tanggal dua puluh empat Mei 2022 dalam Bahasa Indonesia, Prancis dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia



Untuk Dewan Federal Swiss



LAMPIRAN A
EKSPROPRIASI

Para Pihak menegaskan pemahaman bersama bahwa:

1. Tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak tidak dapat dianggap sebagai suatu ekspropriasi kecuali apabila tindakan dimaksud mencampuri hak atas benda berwujud atau tidak berwujud dalam suatu penanaman modal.

2. Pasal 7 ayat 1 (Ekspropriasi) mengamanatkan dua situasi. Yang pertama adalah ekspropriasi langsung, dimana sebuah penanaman modal dinasionalisasi atau sebaliknya diekspropriasi secara langsung melalui pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.

3. Kondisi kedua yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat 1 (Ekspropriasi) adalah ekspropriasi secara tidak langsung, yang mana tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak memiliki dampak serupa dengan ekspropriasi langsung yang dilakukan tanpa pemindahan formal atas asas hak ataupun penyitaan langsung.

   (a) Penentuan dari apakah suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu Pihak, dalam situasi fakta tertentu, merupakan ekspropriasi tidak langsung, memerlukan pemeriksaan kasus-per-kasus berdasarkan fakta yang dipertimbangkan, meliputi faktor-faktor antara lain:

      (i) dampak ekonomi karena tindakan Pemerintah, walaupun faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu Pihak memiliki efek buruk pada nilai ekonomi suatu penanaman modal, dengan sendirinya, tidak berarti bahwa ekspropriasi tidak langsung telah terjadi;

(ii) durasi tindakan atau serangkaian tindakan oleh suatu Pihak;

(iii) sejauh mana tindakan pemerintah mengganggu harapan penanaman modal tertentu yang wajar[15]; dan

(iv) karakter dari tindakan pemerintah, termasuk tujuannya dan apakah tindakan tersebut tidak proporsional dengan tujuan kepentingan publik.

(b) Untuk memperkuat kepastian, kecuali dalam keadaan tertentu ketika dampak suatu tindakan atau serangkaian tindakan sangat parah dibandingkan dengan tujuannya sehingga tindakan tersebut tampak sangat berlebihan, tindakan pengaturan yang tidak diskriminatif oleh suatu Pihak yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi tujuan-tujuan kesejahteraan umum yang sah, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan dan lingkungan, bukan merupakan ekspropriasi tidak langsung.

[15] Untuk memperkuat kepastian, apakah harapan penanam modal terhadap penanaman modalnya termasuk wajar adalah tergantung, sejauh relevan, pada faktor-faktor seperti apakah pemerintah memberikan penanam modal dengan kepastian mengikat dalam bentuk tertulis serta sifat dan sejauh mana peraturan pemerintah atau kemungkinan adanya suatu peraturan pemerintah di sektor terkait.

LAMPIRAN B
KODE PERILAKU UNTUK ARBITER

Tanggung jawab dalam Proses

1. Setiap arbiter wajib menghindari ketidakwajaran dan kesan ketidakpantasan, bersikap independen dan tidak memihak, menghindari konflik kepentingan langsung dan tidak langsung dan memperhatikan standar perilaku yang tinggi sehingga integritas dan ketidakberpihakan proses penyelesaian sengketa dipertahankan. Mantan arbiter wajib mematuhi kewajiban dalam Butir 17, 18 dan 20.

Kewajiban Pengungkapan

2. Sebelum konfirmasi pemilihannya sebagai arbiter berdasarkan Persetujuan ini, seorang kandidat wajib mengungkapkan kepentingan, hubungan, atau masalah apa pun yang mungkin mempengaruhi independensi atau ketidakberpihakannya atau yang mungkin secara wajar menimbulkan kesan ketidakpantasan atau bias dalam proses arbitrase. Untuk tujuan ini, seorang kandidat wajib melakukan semua upaya yang wajar untuk mengetahui kepentingan, hubungan, dan masalah tersebut.

3. Setelah dipilih, seorang arbiter wajib terus melakukan segala upaya yang wajar untuk mengetahui setiap kepentingan, hubungan, dan hal-hal yang dirujuk dalam Butir 2 dan wajib mengungkapkannya dengan mengkomunikasikannya secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban untuk mengungkapkan adalah kewajiban berkelanjutan, yang mengharuskan seorang arbiter untuk mengungkapkan kepentingan, hubungan, dan hal-hal yang mungkin timbul di tahap manapun dalam proses arbitrase.

Pelaksanaan Tugas oleh Arbiter

4. Seorang arbiter wajib memenuhi ketentuan Bab III (Penyelesaian Sengketa) dan tata tertib yang berlaku.

5. Setelah dipilih, seorang arbiter wajib melaksanakan tugasnya secara menyeluruh dan cepat selama proses berlangsung dengan adil dan ketekunan.

6. Seorang arbiter tidak boleh menolak kesempatan arbiter lain untuk berpartisipasi dalam semua aspek persidangan.

7. Seorang arbiter tidak boleh melampaui permintaan para pihak dan tidak boleh mendelegasikan tugas untuk memutuskan kepada orang lain.

8. Seorang arbiter wajib mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa asisten dan stafnya mengetahui, dan mematuhi, Butir 1, 2, 3, 18, 19 dan 20.

9. Setelah panel arbitrase telah dibentuk, seorang arbiter tidak boleh terlibat dalam kontak *ex parte* mengenai proses arbitrase.

10. Seorang arbiter tidak boleh mengkomunikasikan hal-hal mengenai pelanggaran aktual atau potensial oleh arbiter lain kecuali komunikasi tersebut ditujukan kepada kedua pihak yang bersengketa atau diperlukan untuk memastikan apakah arbiter tersebut telah melanggar atau mungkin melanggar Lampiran ini.

Independensi dan Imparsialitas Arbiter

11. Seorang arbiter wajib independen dan imparsial. Seorang arbiter wajib bertindak dengan cara yang adil dan wajib menghindari kesan ketidakpantasan atau bias.

12. Seorang arbiter tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan dari luar, pertimbangan politik, keriuhan publik, kesetiaan kepada suatu pihak atau pihak yang bersengketa atau ketakutan akan kritik.

13. Seorang arbiter tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, mengharapkan kewajiban apa pun atau menerima manfaat apa pun yang akan mengganggu, atau sepertinya akan mengganggu, pelaksanaan tugasnya.

14. Seorang arbiter tidak boleh menggunakan posisinya di panel arbitrase untuk memajukan kepentingan personal atau pribadi apapun. Seorang arbiter wajib menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa orang lain berada dalam posisi khusus untuk mempengaruhi arbiter. Seorang arbiter wajib melakukan segala upaya untuk mencegah atau menahan orang lain untuk menyatakan diri mereka berada dalam posisi tersebut.

15. Seorang arbiter tidak boleh mengizinkan tanggung jawab keuangan, bisnis, profesional, keluarga atau sosial di masa lalu atau yang ada saat ini untuk mempengaruhi perilaku atau penilaian arbiter.

16. Seorang arbiter wajib menghindari hubungan apapun, atau memperoleh kepentingan keuangan apapun, yang mungkin mempengaruhi imparsialitasnya atau yang mungkin menimbulkan kesan ketidakpantasan atau bias.

Tugas dalam Situasi Tertentu

17. Seorang arbiter atau arbiter terdahulu wajib menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa arbiter tersebut bias dalam menjalankan tugasnya atau akan mendapat manfaat dari keputusan atau putusan panel arbitrase.

Pemeliharaan Kerahasiaan

18. Seorang arbiter atau arbiter terdahulu tidak boleh kapanpun mengungkapkan atau menggunakan informasi non-publik apapun mengenai persidangan atau yang diperoleh selama persidangan kecuali untuk tujuan persidangan dan sepanjang pengungkapan tersebut mungkin diperlukan oleh persyaratan hukum atau konstitusional, dan tidak boleh, dalam hal apa pun, mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain atau untuk merugikan kepentingan orang lain.

19. Seorang arbiter tidak boleh mengungkapkan putusan panel arbitrase atau bagian-bagiannya sebelum pengumuman putusan.

20. Seorang arbiter atau arbiter terdahulu tidak boleh setiap saat mengungkapkan pertimbangan panel arbitrase, atau pandangan arbiter manapun, kecuali sebagaimana diharuskan oleh persyaratan hukum atau konstitusional.



REPUBLIK INDONESIA

ACCORD ENTRE LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE CONCERNANT LA PROMOTION ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

PRÉAMBULE

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommés « Parties » ou individuellement « Partie »,

DÉSIREUX d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux États ;

RECONNAISSANT que la création d'un environnement propice aux entreprises contribuera à stimuler l'initiative entrepreneuriale en vue d'accroître les investissements effectués par des investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie ;

RECONNAISSANT la contribution importante que les investissements peuvent apporter au développement durable, et cherchant à promouvoir et à faciliter les investissements sur les territoires respectifs des Parties ;

RECONNAISSANT que la promotion et la protection réciproque des investissements peut stimuler l'initiative entrepreneuriale, favoriser l'afflux de capitaux et de technologies et accroître le développement économique et la prospérité dans les deux États ;

CONVAINCUS que ces objectifs sont réalisables sans affaiblir les normes d'application générale relatives à la santé, à la sécurité, au travail et à l'environnement ;

AFFIRMANT le soutien réciproque des politiques en matière d'investissement, d'environnement et de travail à cet égard ;

RÉAFFIRMANT leur engagement à l'égard des principes et objectifs fixés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1
Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme « monnaie librement convertible » désigne une monnaie largement négociée sur le marché international des changes et largement utilisée dans les transactions internationales.
2. Le sigle « CIRDI » désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
3. Le terme « Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI » désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, tel qu'amendé et en vigueur au 10 avril 2006.
4. Le terme « Règlement d'arbitrage du CIRDI » désigne le Règlement de procédure relatif aux instances d'arbitrage (Règlement d'arbitrage), tel qu'amendé et en vigueur au 10 avril 2006.
5. Le terme « Convention CIRDI » désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.
6. Le terme « investissement » désigne tout actif qu'un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d'un investissement, notamment l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l'attente de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment prendre la forme :
   (a) d'une entreprise ;
   (b) d'actions et d'autres formes de participation au capital d'une entreprise ;

(c) d'obligations, garanties ou non, d'autres titres de créance et de prêts[1, 2] ;

(d) de droits de propriété intellectuelle ;

(e) de créances monétaires et de droits à une prestation contractuelle en rapport avec une entreprise et ayant une valeur financière[3] ;

(f) de contrats clés en main, de contrats de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de revenus et d'autres contrats similaires ;

(g) de licences, d'autorisations, de permis et de droits similaires conférés conformément aux lois de la Partie[4], et

(h) d'autres biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, et de droits de propriété connexes tels que baux, hypothèques et droits de gage.

Le terme « investissement » ne vise pas les ordonnances et arrêts rendus dans le contexte d'une action judiciaire ou administrative ni les sentences arbitrales rendues dans une procédure d'arbitrage.

Aux fins de la définition d'un investissement dans le présent article, tout revenu investi est considéré comme un investissement et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n'a aucune incidence sur leur qualité d'investissement.

7. Le terme « investisseur » désigne :

(a) une personne physique qui, conformément au droit d'une Partie, est ressortissant de cette Partie, ou

---

1 Certaines formes de créance, telles que les obligations, garanties ou non, et les billets à ordre à long terme, sont plus susceptibles de présenter les caractéristiques d'un investissement, alors que d'autres formes de créance, telles que les créances de paiement exigibles qui résultent de la vente de marchandises ou de services, le sont moins.

2 Un prêt accordé par une Partie à l'autre Partie n'est pas un investissement.

3 Il est entendu que le terme *investissement* ne vise pas les créances liquides découlant uniquement :
(a) de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services, ou
(b) de l'octroi de crédits en rapport avec de tels contrats commerciaux.

4 La question de savoir si un type particulier de licence, d'autorisation, de permis ou de tout autre instrument similaire (notamment une concession, dans la mesure où elle a la nature d'un tel instrument) présente les caractéristiques d'un investissement dépend de facteurs tels que la nature et l'étendue des droits que le droit de la Partie confère au détenteur. Les instruments qui ne présentent pas les caractéristiques d'un investissement comprennent ceux qui ne créent pas de droits protégés en application du droit de la Partie. Il est entendu que ce qui précède ne préjuge en rien la question de savoir si tout actif associé à ces instruments présente les caractéristiques d'un investissement.

(b) une personne morale, notamment une société, une société de capitaux, une société de personnes ou une autre organisation, qui est constituée ou organisée de toute autre manière conformément au droit de cette Partie et qui a son siège, ainsi que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie,

qui a effectué un investissement.

8. Le terme « entreprise établie localement » désigne une entreprise détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par un investisseur d'une Partie et qui est établie sur le territoire de l'autre Partie. Une entreprise est :
   (a) détenue par des personnes physiques ou entreprises d'une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes physiques ou entreprises de cette Partie ;
   (b) contrôlée par personnes physiques ou entreprises d'une Partie si ces personnes physiques ou entreprises ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.
9. Le terme « Convention de New York » désigne la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée aux Nations Unies, à New York, le 10 juin 1958.
10. Le terme « revenus » désigne les montants générés par un investissement ou qui en sont issus, y compris, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
11. Le terme « territoire » désigne le territoire d'une Partie tel que défini par les lois de la Partie concernée conformément au droit international.
12. Le terme « Règlement d'arbitrage de la CNUDCI » désigne le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976.

Article 2
Champ d'application de l'Accord

1. Le présent Accord s'applique aux investissements établis ou acquis sur le territoire d'une Partie, et, le cas échéant, admis[5] conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord ne s'applique pas aux créances ou différends nés d'événements qui se sont produits[6] avant son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux marchés publics.
4. L'art. 5 (Traitement national) ne s'applique pas aux subventions ou contributions accordées par une Partie, notamment les prêts, garanties et assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental, ni à aucune des conditions liées à l'obtention ou au renouvellement de ces subventions ou contributions, que ces subventions ou contributions soient ou non proposées exclusivement à des investisseurs de la Partie ou à des investissements d'investisseurs de la Partie.

Article 3
Mesures fiscales

1. À l'exception du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales.
2. Le présent Accord accorde des droits ou impose des obligations en relation avec des mesures fiscales uniquement si ces droits ou obligations sont prévus :
   (a) par l'art. 9 (Transferts), ou
   (b) par l'art. 7 (Expropriation).

---

[5] Il est entendu que, dans le cas de l'Indonésie, « admis conformément à ses lois et règlements » peut inclure l'exigence d'une approbation spécifique par écrit.

[6] Il est entendu que le présent Accord n'engage pas une Partie à l'égard d'un acte ou d'un fait ayant eu lieu avant la date de son entrée en vigueur pour cette Partie ou d'une situation ayant cessé d'exister avant cette date.

3. Lorsque l'al. 2, let. (a) ou let. (b), s'applique, le chapitre III, section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie), s'applique également en ce qui concerne les mesures fiscales.
4. Si un investisseur fait valoir que la Partie défenderesse a violé l'art. 9 (Transferts) ou l'art. 7 (Expropriation) par l'adoption ou l'application d'une mesure fiscale, les autorités compétentes de la Partie défenderesse peuvent demander des consultations avec les autorités compétentes de la Partie qui n'est pas partie au litige au moment où la Partie défenderesse reçoit la notification d'intention de l'investisseur au titre de l'art. 19 (Dépôt d'une plainte). Les autorités compétentes des Parties tiennent des consultations en vue de déterminer si l'art. 9 (Transferts) a été violé ou si la mesure fiscale constitue une expropriation visée à l'art. 7 (Expropriation). Tout tribunal arbitral pouvant être institué conformément au chapitre III, section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie), pour examiner des mesures fiscales est lié par la décision prise par les autorités compétentes en vertu du présent alinéa.

   Si les autorités compétentes des Parties ne parviennent pas à déterminer si l'art. 9 (Transferts) a été violé ou si la mesure fiscale constitue une expropriation visée à l'art. 7 (Expropriation) dans un délai de 360 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui n'est pas partie au litige, l'investisseur peut soumettre sa plainte à un arbitrage conformément à l'art. 19 (Dépôt d'une plainte).
5. Pour déterminer si une mesure de nature fiscale constitue une expropriation, les considérations suivantes sont prises en compte :
   (a) le prélèvement d'impôts ne constitue généralement pas une expropriation. La simple mise en place de nouvelles mesures fiscales ou le prélèvement d'impôts dans plus d'une juridiction en rapport avec un investissement ne constituent pas en soi une expropriation ;
   (b) les activités visant à faire appliquer les lois fiscales, notamment la saisie de biens aux fins du recouvrement des impôts, ne constituent généralement pas une expropriation ;

(c) les mesures fiscales qui sont conformes aux politiques, principes et pratiques fiscaux reconnus au niveau international ne constituent généralement pas une expropriation. En particulier, les mesures fiscales visant à empêcher la soustraction ou l'évasion fiscales ne devraient pas être considérées comme expropriantes, et

(d) les mesures fiscales appliquées sur une base non discriminatoire, par opposition à celles ciblant des investisseurs d'une nationalité donnée ou des contribuables individuels spécifiques, ne sont pas susceptibles de constituer une expropriation. Une mesure fiscale ne devrait pas constituer une expropriation si elle était déjà en vigueur au moment où l'investissement a été effectué et que des informations relatives à la mesure avaient été publiées ou rendues autrement accessibles au public.

6. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations de l'une ou l'autre Partie en vertu d'une quelconque convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention fiscale, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité. Il incombe aux autorités compétentes en vertu de cette convention et à elles seules de déterminer s'il existe une incompatibilité entre le présent Accord et ladite convention.

7. Aux fins du présent article :

(a) le terme « convention fiscale » à l'al. 6 désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale auquel les Parties sont parties ;

(b) le terme « autorités compétentes » à l'al. 4 désigne :

(i) s'agissant de l'Indonésie, le ministre des Finances ou son représentant habilité,

(ii) s'agissant de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant habilité.

CHAPITRE II
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

Article 4
Traitement des investissements

1. Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales aux investissements des investisseurs de l'autre Partie conformément au présent article.
2. Une Partie viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable prévue à l'al. 1 lorsqu'une mesure ou une série de mesures constitue :
   (a) un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives ;
   (b) une violation fondamentale du principe de l'application régulière du droit, notamment une violation fondamentale de la transparence, dans le cadre de procédures judiciaires et administratives ;
   (c) un cas d'arbitraire manifeste ;
   (d) une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses, ou
   (e) un traitement abusif, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement.
3. À la demande d'une Partie, les Parties réexaminent la teneur de l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable selon la procédure prévue à l'art. 44 (Entrée en vigueur, durée et extinction) pour les amendements à l'Accord, et déterminent en particulier si un traitement autre que ceux énumérés à l'al. 2 peut également constituer une violation de ladite obligation.
4. L'expression « protection et sécurité intégrales » implique que chaque Partie prenne les mesures pouvant être raisonnablement nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des investissements.
5. Lorsqu'il applique l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable, le tribunal arbitral peut tenir compte du fait qu'une Partie a pris ou non un engagement spécifique par écrit à l'égard d'un investisseur en vue d'encourager un investissement, lequel a créé une attente légitime et motivé la décision

de l'investisseur d'effectuer ou de maintenir l'investissement, mais auquel la Partie n'a pas donné suite.

6. Le simple fait qu'une Partie agisse ou s'abstienne d'agir d'une manière qui pourrait être incompatible avec les attentes d'un investisseur ne constitue pas une violation du présent article, même si cela occasionne une perte ou un préjudice à l'investissement.
7. La constatation d'une violation d'une autre disposition du présent Accord ou d'un autre accord international n'établit pas l'existence d'une violation du présent article.

Article 5
Traitement national

1. Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables[7], aux investissements de ses propres investisseurs[8].
2. Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ou l'aliénation de leurs investissements.
3. Il est entendu que le traitement devant être accordé par une Partie en application des al. 1 et 2 désigne, dans le cas d'un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement de niveau régional accorde, dans des circonstances

---

[7] Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des « circonstances semblables » selon l'art. 5 (Traitement national) ou l'art. 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) dépend de l'ensemble des circonstances, notamment le ou les secteurs économiques ou commerciaux concernés et la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction entre les investissements en fonction d'objectifs légitimes de bien-être public.

[8] Il est entendu que le présent article ne s'applique pas aux mesures relatives à l'aliénation d'un investissement si les investisseurs étrangers ont été avertis, à la date ou au cours de l'enregistrement de leur investissement, que leur investissement serait aliéné ultérieurement conformément à la législation nationale de la Partie hôte.

semblables, aux investisseurs de la Partie dont il fait partie et aux investissements de ces investisseurs.

Article 6

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs de toute tierce partie.
2. Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investisseurs de l'autre Partie que celui qu'elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs de toute tierce partie en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ou l'aliénation de leurs investissements.
3. Le traitement prévu aux al. 1 et 2 ne vise pas :
   (a) les accords bilatéraux ou régionaux en matière d'investissement actuels qui ont été signés ou sont entrés en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent Accord ;
   (b) les arrangements conclus avec une tierce partie de la même région géographique visant la promotion de la coopération régionale en matière économique, sociale, industrielle, monétaire ou d'emploi dans le cadre de projets précis ;
   (c) les accords actuels ou futurs établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun prévoyant qu'une Partie accorde un traitement préférentiel aux investisseurs d'États tiers, ou
   (d) les conventions actuelles ou futures en vue d'éviter les doubles impositions et les autres conventions fiscales.
4. Il est entendu que les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux procédures ou mécanismes de résolution des différends internationaux figurant dans d'autres accords internationaux et ne peuvent être interprétés comme concédant aux investisseurs des procédures ou mécanismes de résolution des différends

autres que ceux prévus par le chapitre III (Règlement des différends), section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l'autre Partie).

5. Il est entendu que les obligations de fond figurant dans d'autres accords internationaux en matière d'investissement conclus par une Partie ne sont pas en elles-mêmes assimilables à un traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. 1 et 2, et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l'absence de mesures concrètes adoptées ou maintenues par cette Partie conformément à ces obligations.

Article 7
Expropriation

1. Aucune des Parties n'exproprie ni ne nationalise un investissement d'un investisseur de l'autre Partie, directement ou indirectement, au moyen de mesures équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommées « expropriation »), sauf lorsque cette expropriation est effectuée :
   (a) pour des motifs d'intérêt public ;
   (b) de façon non discriminatoire ;
   (c) moyennant le prompt versement d'une indemnité adéquate et effective, conformément aux al. 3 et 4, et
   (d) dans le respect du principe de l'application régulière du droit.

   Le présent alinéa est interprété conformément à l'Annexe A sur l'expropriation.
2. À la demande d'un investisseur, toute mesure d'expropriation ou d'estimation fera l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante selon la procédure prévue par les lois de la Partie qui prend la mesure.
3. L'indemnité visée a l'al. 1, let. (c) :
   (a) est versée sans délai[9] ;

[9] Les Parties comprennent qu'il peut y avoir des procédures juridiques ou administratives à observer avant que le versement puisse être effectué.

(b) équivaut à la juste valeur marchande[10] de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu (la date de l'expropriation) ou que l'imminence de l'expropriation ne devienne de notoriété publique, la date la plus proche étant retenue ;

(c) ne tient compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation envisagée était déjà connue, et

(d) est effectivement réalisable et librement transférable conformément à l'art. 9 (Transferts).

4. L'indemnité produit, entre la date de l'expropriation et la date du versement, des intérêts calculés au taux approprié du marché. Les critères d'évaluation utilisés pour déterminer la juste valeur marchande peuvent comprendre la valeur d'exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens corporels et d'autres critères, le cas échéant.

5. Nonobstant les dispositions des al. 1, 3 et 4, toute mesure d'expropriation directe portant sur des terrains qui est fixée dans la législation de la Partie expropriante s'effectue pour des motifs d'intérêt public et moyennant le versement d'une indemnité à la juste valeur marchande, conformément à ladite législation.

6. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance, révocation, restriction ou création est conforme à l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC[11].

---

[10] L'évaluation de la juste valeur marchande de l'investissement exproprié exclut les profits spéculatifs ou exceptionnels.

[11] Il est entendu que les Parties ont reconnu aux fins du présent article que le terme « révocation » de droits de propriété intellectuelle vise notamment la déchéance ou l'annulation de ces droits, et que le terme « restriction » de droits de propriété intellectuelle vise notamment les exceptions à ces droits.

Article 8
Indemnisation des pertes

1. Les investisseurs d'une Partie dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie subissent des pertes du fait d'une guerre ou d'un autre conflit armé, de troubles civils, d'un état d'urgence national, d'une révolte, d'une insurrection, d'une émeute ou d'autres situations similaires sur le territoire de cette dernière Partie se voient accorder par celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, le dédommagement ou toute autre forme de règlement, le cas échéant, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière Partie accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute tierce partie, si ce dernier est plus favorable.
2. Nonobstant l'al. 1, un investisseur d'une Partie qui, dans l'une des situations visées dans cet alinéa, subit une perte sur le territoire de l'autre Partie du fait :
   (a) de la réquisition de tout ou partie de son investissement par les forces ou autorités de l'autre Partie, ou
   (b) de la destruction de tout ou partie de son investissement par les forces ou autorités de l'autre Partie, alors que la situation ne l'exigeait pas,

   se voit accorder, par l'autre Partie, soit la restitution de ses biens, soit une indemnité. S'agissant de l'indemnité, la valeur n'excède pas la perte subie.

Article 9
Transferts

1. Chaque Partie permet que tous les transferts se rapportant aux investissements d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire soient effectués librement et sans délai à destination et en provenance de son territoire. Ces transferts comprennent :
   (a) les apports en capital, notamment l'apport initial ; les bénéfices, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les frais d'assistance technique, les frais de gestion et frais techniques, les intérêts et autres revenus courants provenant d'un investissement ;

(b) le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement ;

(c) les versements effectués au titre d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, notamment les versements effectués au titre d'une convention de prêt ;

(d) les versements effectués en vertu de l'art. 7 (Expropriation) et de l'art. 8 (Indemnisation des pertes) ;

(e) les gains et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger pour les besoins de cet investissement, et

(f) les versements découlant du règlement d'un différend selon le chapitre III (Règlement des différends).

2. À moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'investisseur, chaque Partie permet que ces transferts soient effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer, de manière équitable et non discriminatoire, et de bonne foi, ses lois concernant :

(a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers ;

(b) l'émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d'options ou de produits dérivés ;

(c) les infractions criminelles ou pénales ;

(d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu'ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l'application des lois ou de la réglementation financière ;

(e) le respect des ordonnances ou jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ;

(f) la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d'épargne obligatoire ;

(g) les indemnités de départ des employés, ou

(h) la fiscalité.

4. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et obligations des membres du Fonds monétaire international en vertu des *Statuts du*

Fonds monétaire international, notamment l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du Fonds monétaire international.

5. Un transfert est réputé avoir eu lieu « sans délai » s'il a été effectué dans le délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités de transfert imposées par la banque centrale et les autres autorités compétentes d'une Partie. Ce délai commence à courir le jour où la demande de transfert est présentée et ne peut en aucun cas excéder 2 mois. Ces formalités s'appliquent sans discrimination aux investisseurs.

Article 10

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ou si, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux causent ou menacent de causer de graves difficultés de gestion macroéconomique, en particulier eu égard aux politiques monétaire et de taux de change, elle peut adopter ou maintenir des restrictions sur les paiements ou les mouvements de capitaux liés aux investissements.
2. Les restrictions adoptées ou maintenues en vertu de l'al. 1 :
   (a) sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international ;
   (b) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de l'autre Partie ;
   (c) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l'al. 1 ;
   (d) sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation envisagée à l'al. 1 s'améliore ;
   (e) sont appliquées sur la base du traitement national ;
   (f) garantissent que l'autre Partie est traitée aussi favorablement que toute tierce partie ;

(g) ne visent pas les paiements ou les transferts relatifs aux transactions courantes, à moins que la mise en place de telles mesures soit conforme aux procédures prévues par les Statuts du Fonds monétaire international.

Article 11
Subrogation

1. Si une Partie, ou un organisme, une institution, une collectivité publique ou une société désignés par elle, effectue un versement à un investisseur de cette Partie au titre d'une garantie, d'un contrat d'assurance ou d'une autre forme d'indemnité qu'il a conclus sur les risques non commerciaux en rapport avec un investissement, l'autre Partie, sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit qu'aurait eu l'investisseur au titre du présent Accord en rapport avec cet investissement. L'investisseur ne peut exercer ces droits dans la mesure de la subrogation.
2. Les droits ou créances subrogés ou transférés n'excèdent pas les droits ou créances originaux dudit investisseur.

Article 12
Droit de réglementer

1. Aux fins du présent Accord, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires respectifs pour pouvoir réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tels que la protection de la santé publique, l'action sociale, l'enseignement public, la sécurité, l'environnement, la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, et la promotion et la protection de la diversité culturelle.
2. Il est entendu que le simple fait qu'une Partie exerce son droit de réglementer, notamment en modifiant ses lois, d'une manière qui a des effets défavorables

sur un investissement ou qui contrarie les attentes d'un investisseur, notamment ses attentes de profits, ne représente pas une violation d'une obligation prévue par le présent Accord.

Article 13
Responsabilité sociétale des entreprises

Chaque Partie encourage les personnes morales opérant sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer volontairement dans leurs politiques internes les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociétale des entreprises qui bénéficient du soutien ou de l'adhésion de cette Partie.

Article 14
Mesures contre la corruption

1. Un investisseur d'une Partie et ses investissements s'abstiennent, avant ou après l'établissement d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public de l'autre Partie, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent ou ce tiers agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir une quelconque faveur en rapport avec un investissement.
2. Un investisseur d'une Partie et ses investissements ne se rendent pas complices, sur le territoire de l'autre Partie, d'un acte décrit à l'al. 1, notamment par instigation ou assistance.

CHAPITRE III
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION UNE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UNE PARTIE ET UN INVESTISSEUR DE L'AUTRE PARTIE

Article 15
Champ d'application

1. La présente section s'applique aux différends opposant une Partie et un investisseur de l'autre Partie (« parties au différend ») concernant une violation alléguée de la première à une obligation en vertu du présent Accord qui occasionne une perte ou un préjudice à l'investisseur (ci-après dénommé « différend relatif à un investissement »).
2. La présente section ne s'applique pas aux différends relatifs à un investissement qui sont survenus avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
3. Une personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté d'une Partie ne peut pas déposer une plainte contre cette Partie au titre de la présente section.
4. Une personne morale d'une Partie et ses filiales ne peuvent pas déposer une plainte contre l'autre Partie au titre de la présente section si cette personne morale est détenue ou contrôlée par un investisseur d'une tierce partie et que l'autre Partie n'entretient pas de relations diplomatiques avec cette tierce partie.

Article 16
Transparence de la procédure d'arbitrage

1. Sous réserve de l'al. 2, la Partie défenderesse rend accessible au public l'ensemble des sentences et décisions rendues par le tribunal arbitral.

2. Tout renseignement spécifiquement désigné comme confidentiel qui est transmis au tribunal arbitral ou aux parties au différend est protégé contre la divulgation au public.
3. Toute partie au différend qui entend utiliser des renseignements désignés comme confidentiels lors d'une audience en informe le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divulgation de ces renseignements.
4. Les audiences du tribunal arbitral ont lieu à huis clos lorsque les discussions portent sur des renseignements confidentiels. Dans le cas contraire, elles sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.
5. Le tribunal arbitral n'oblige pas une partie au différend à révéler des renseignements commerciaux confidentiels ou d'autres renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire aux intérêts de la Partie défenderesse en matière de sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article 17
Consultations

1. En cas de différend relatif à un investissement, les parties au différend cherchent d'abord à résoudre le différend par voie de consultations en vue de parvenir à un règlement amiable. Ces consultations sont engagées par une demande écrite de consultations adressée par l'investisseur partie au litige à la Partie défenderesse.
2. Dans le but de résoudre un différend par voie de consultations, la demande écrite de consultations contient des renseignements sur le fondement juridique et factuel du différend relatif à un investissement, notamment le nom et l'adresse du demandeur, les dispositions du présent Accord dont la violation est alléguée, la réparation demandée, le montant estimé des dommages-

intérêts réclamés et la preuve que le demandeur est un investisseur de l'autre Partie et qu'il détient ou contrôle les investissements.

Article 18
Médiation

1. Si le différend relatif à un investissement ne peut être résolu par voie de consultations, une partie au différend peut demander à l'autre partie au différend de recourir à une procédure non contraignante faisant intervenir un tiers, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation. Ce processus est engagé par une demande écrite adressée par une partie au différend à l'autre partie au différend et exige le consentement des deux parties au différend.
2. Le processus visé au présent article ne peut être engagé par une partie au différend que dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la demande écrite de consultations par la Partie défenderesse.
3. Les frais liés au processus visé au présent article sont supportés à parts égales par les parties au différend. Chaque partie au différend supporte ses propres frais découlant de sa participation au processus.

Article 19
Dépôt d'une plainte

1. Si un différend relatif à un investissement ne peut être résolu dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande écrite de consultations par la Partie défenderesse, et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, l'investisseur partie au litige peut soumettre le différend, en son propre nom ou au nom de son entreprise établie localement[12], aux cours ou aux tribunaux administratifs de la Partie concernée ou à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur a le choix entre :

[12] Il est entendu qu'une entreprise ne peut pas déposer elle-même une plainte contre la Partie dans laquelle elle est établie.

(a) la Convention CIRDI et le Règlement d'arbitrage du CIRDI, à la condition que la Partie défenderesse et la Partie de l'investisseur partie au litige soient parties à la Convention CIRDI ;

(b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition que la Partie défenderesse ou la Partie de l'investisseur partie au litige soit partie à la Convention CIRDI ;

(c) le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ou

(d) toute autre institution d'arbitrage ou tout autre règlement d'arbitrage, si les parties au différend en conviennent ainsi.

2. En cas de conflit entre les dispositions du présent Accord et les dispositions du règlement d'arbitrage applicable, les dispositions du présent Accord prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

3. Chaque Partie donne son consentement à la soumission de tout différend à l'arbitrage visé à l'al. 1 conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des exigences applicables à cette soumission fixées dans le présent article.

4. Le consentement visé à l'al. 3 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage en vertu de la présente section satisfont aux exigences :

(a) du chapitre II (De la compétence du Centre) de la Convention CIRDI et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend, et

(b) de l'art. II de la Convention de New York en ce qui concerne l'existence d'une « convention écrite ».

5. Le demandeur ne peut soumettre sa plainte à l'arbitrage que si, cumulativement :

(a) il adresse une notification écrite à la Partie défenderesse concernant son intention de soumettre le différend à l'arbitrage au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte, notification qui contient des renseignements sur le fondement juridique et factuel du différend relatif à un investissement fournis par l'investisseur partie au litige dans sa demande de consultations et toute modification apportée aux renseignements qui y figurent ;

(b) il transmet au défendeur, au moment du dépôt de la plainte, son consentement à ce que le différend soit réglé par voie d'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans la présente section ;

(c) il n'a pas indiqué dans sa plainte une mesure qui n'était pas indiquée dans sa demande de consultations ;

(d) il se retire ou se désiste de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international en rapport avec une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation visée par sa plainte, et

(e) il renonce à son droit de soumettre une plainte ou d'engager une procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international en rapport avec une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation visée par sa plainte.

Les let. (d) et (e) ci-dessus ne s'appliquent pas aux recours contre des mesures injonctives, déclaratoires et non pécuniaires, à la condition que l'action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l'entreprise pendant la durée de la procédure d'arbitrage.

6. Une plainte ne peut être soumise à l'arbitrage au titre du présent chapitre que si aucune sentence finale concernant la même mesure dont il est allégué qu'elle viole les dispositions du chapitre II (Protection des investissements) n'a été rendue au sujet d'une plainte déposée par l'investisseur partie au litige devant un autre tribunal arbitral institué en vertu de la présente section ou de tout autre accord contenant des dispositions sur la protection des investissements.

7. Dans le cas où l'investisseur n'a pas soumis le différend à l'arbitrage international en vertu de l'al. 1 dans un délai de 24 mois à compter de la date de réception, par la Partie défenderesse, de la demande écrite de consultations, l'investisseur est réputé avoir retiré sa demande de consultations et ne peut plus soumettre le même différend à l'arbitrage international en vertu de l'al. 1. Cette période peut être prolongée si les parties au différend en conviennent ainsi par écrit avant qu'elle n'expire.

8. Le consentement des Parties à la soumission d'un différend à l'arbitrage visé à l'al. 1 conformément aux dispositions de la présente section est subordonné à la condition que le différend relatif à un investissement soit soumis dans un délai de 5 ans à compter du moment où l'investisseur partie au litige a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance d'une violation d'une obligation prévue par le présent Accord occasionnant une perte ou un préjudice à l'investisseur partie au litige ou à son investissement. Cette période peut être prolongée si les parties au différend en conviennent ainsi par écrit avant qu'elle n'expire.

Article 20

Financement par un tiers

1. Si les parties au différend bénéficient d'un financement par un tiers, elles notifient au tribunal arbitral le nom et l'adresse de ce tiers.
2. Cette notification est effectuée lors du dépôt de la plainte ou sans délai après la conclusion de la convention de financement par un tiers ou l'octroi du don ou de la subvention, selon le cas.
3. Si les parties au différend omettent de révéler l'existence d'un financement par un tiers en vertu du présent article, le tribunal arbitral peut tenir compte de l'attitude des parties au différend dans l'allocation des dépens, ou suspendre ou clore la procédure par voie d'ordonnance.

Article 21

Constitution du tribunal arbitral

1. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral se compose de trois arbitres, qui ne sont ressortissants ou résidents permanents d'aucune des deux Parties. Chaque partie au différend nomme un arbitre ; les arbitres nommés se mettent d'accord sur le choix d'un troisième arbitre, qui est le président du tribunal arbitral. Le président du tribunal

arbitral est ressortissant d'une tierce partie qui entretient des relations diplomatiques avec les deux Parties.

2. Si aucun tribunal arbitral n'a été institué dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, soit parce qu'une partie au différend n'a pas nommé d'arbitre soit parce que les arbitres nommés ne se sont pas mis d'accord sur le choix du président, le secrétaire général du CIRDI, à la demande de l'une des parties au différend, nomme à sa discrétion le ou les arbitres non encore nommés. Si le secrétaire général est ressortissant ou résident permanent de l'une des Parties ou s'il est autrement empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint du CIRDI qui n'est ni ressortissant ni résident permanent de l'une des Parties peut être invité à procéder aux nominations nécessaires.
3. Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public, de droit de l'investissement international et de la résolution des différends relevant du droit de l'investissement international. Les arbitres sont indépendants des Parties et de l'investisseur partie au litige ; ils n'ont de lien avec aucun d'eux et ne reçoivent d'instructions d'aucun d'eux.
4. Si un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n'est plus à même d'exercer son mandat, un successeur est nommé de la même manière que celle prévue pour la nomination de l'arbitre initial ; le successeur a les mêmes pouvoirs et devoirs que l'arbitre initial.
5. Les arbitres nommés en vertu de la présente section se conforment au code de conduite des arbitres figurant à l'Annexe B du présent Accord.

Article 22

Droit applicable et interprétation conjointe

1. Un tribunal arbitral institué conformément à l'art. 21 (Constitution du tribunal arbitral) statue sur les questions en litige en se fondant sur les dispositions du présent Accord interprétées conformément aux règles applicables du droit international. En outre, il peut appliquer d'autres règles de droit international

et des règles de droit interne dans tous les cas où cela est approprié au vu des questions à régler.

2. Lorsque des questions d'interprétation d'une disposition de l'Accord suscitent des préoccupations, les Parties peuvent adopter une interprétation conjointe. Une telle interprétation conjointe de la disposition concernée lie tout tribunal arbitral institué en vertu du chapitre III du présent Accord. Les Parties peuvent décider que cette interprétation conjointe a force obligatoire à partir d'une date déterminée.

Article 23

Siège de l'arbitrage

À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral détermine le siège de l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage applicable, à la condition que ce siège soit situé sur le territoire d'un État qui est partie à la Convention de New York.

Article 24

Procédure d'arbitrage

1. Lorsque des exceptions préliminaires relatives à des questions de compétence ou de recevabilité sont soulevées, un tribunal arbitral statue avant de procéder sur le fond.
2. La Partie défenderesse peut, au plus tard 45 jours après la constitution du tribunal arbitral, soulever à titre préliminaire une exception selon laquelle une plainte est exclue en vertu de l'art. 15 (Champ d'application de l'Accord). La Partie défenderesse peut également soulever une exception au motif de l'incompétence du tribunal arbitral à raison du lieu ou de la matière, ou soulever toute autre exception, par exemple le caractère frivole ou manifestement non fondé d'une plainte, même si les faits allégués sont considérés comme avé-

rés. La Partie défenderesse expose le plus précisément possible le fondement de l'exception qu'elle soulève. La disposition précédente ne préjuge en rien la capacité de la Partie défenderesse de soulever une telle exception à un stade ultérieur de la procédure.

3. Le tribunal arbitral examine ces exceptions à titre préliminaire, séparément du fond de la plainte. Les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs vues et observations au tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral statue que la plainte est exclue selon l'art. 15 (Champ d'application de l'Accord) ou qu'elle est par ailleurs hors de sa compétence à raison du lieu ou de la matière, ou sur toute autre exception, il rend une sentence ou une décision à cet effet.
4. Le tribunal arbitral statue de manière accélérée sur toute exception préliminaire soulevée en application du présent article. Le tribunal arbitral suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée sur l'exception au plus tard 150 jours après la date de la demande. Toutefois, si une partie au différend demande une audience, le tribunal arbitral dispose d'une période additionnelle de 30 jours pour rendre sa décision ou sentence. Indépendamment du fait qu'une audience soit demandée ou non, le tribunal arbitral peut, lorsque l'existence de motifs extraordinaires est démontrée, différer sa décision ou sentence d'une brève période additionnelle, qui ne peut excéder 30 jours.

Article 25

Protection diplomatique

Aucune des Parties n'accorde de protection diplomatique ni ne formule de plainte internationale au sujet d'un différend que l'un de ses investisseurs et l'autre Partie ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage conformément à la présente section, à moins que l'autre Partie ne conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend. Aux fins du présent alinéa, la protection diplomatique ne vise pas les échanges diplomatiques informels tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.

Article 26
Sentences

1. Lorsqu'il rend une sentence définitive défavorable à la Partie défenderesse, le tribunal arbitral peut accorder, de façon séparée ou combinée, uniquement :
   (a) le versement de dommages-intérêts pécuniaires et des intérêts applicables, et
   (b) la restitution de biens, à la condition que la Partie défenderesse puisse verser, au lieu de la restitution, des dommages-intérêts pécuniaires représentant la juste valeur marchande du bien au moment qui précède immédiatement l'expropriation, ou avant que l'expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier, et les intérêts applicables.
2. Un tribunal arbitral peut également allouer des dépens et des frais de représentation et d'assistance juridiques conformément à la présente section et au règlement d'arbitrage applicable.
3. Un tribunal arbitral ne prononce pas de dommages-intérêts punitifs.
4. La sentence est obligatoire et ne peut faire l'objet d'un mécanisme de recours autre que ceux prévus par la Convention CIRDI ou tout autre règlement d'arbitrage applicable sur lequel la procédure d'arbitrage choisie par l'investisseur est basée.
5. Une partie au différend ne peut demander l'exécution d'une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   (a) dans le cas d'une sentence définitive rendue conformément à la Convention CIRDI :
      (i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence,
      (ii) soit la procédure de révision ou d'annulation a été menée à terme ;

(b) dans le cas d'une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ou à tout autre règlement d'arbitrage choisi en vertu de l'art. 19 (Dépôt d'une plainte), al. 1, let. (d) :

(i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n'a engagé de procédure visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence,

(ii) soit une cour a rejeté ou accueilli une demande visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence, et sa décision n'est plus susceptible d'appel.

6. Sous réserve de l'al. 5 et des procédures de révision applicables, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.

Article 27
Frais

1. Le tribunal arbitral condamne aux frais de procédure la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal arbitral peut répartir les frais de procédure entre les parties au différend s'il le juge opportun au regard des circonstances de l'espèce. D'autres frais raisonnables, y inclus les frais de représentation et d'assistance juridiques, sont aussi à la charge de la partie au différend qui succombe, sauf si le tribunal arbitral le juge inopportun au regard des circonstances de l'espèce. S'il n'a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du demandeur, les frais sont alloués proportionnellement en fonction du nombre ou de l'ampleur des chefs de demande accueillis.
2. Le tribunal arbitral fait en sorte que toutes les décisions sur les frais soient motivées et fassent partie intégrante de la sentence.

Article 28

Sûretés en garantie des frais

1. À la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral peut ordonner à toute partie au différend qui soumet une plainte ou une demande reconventionnelle de fournir des sûretés en garantie des frais.
2. Pour déterminer s'il convient d'ordonner à une partie au différend de fournir des sûretés en garantie des frais, le tribunal arbitral considère l'ensemble des circonstances pertinentes, notamment :
   (a) la capacité de cette partie au différend de se conformer à une décision sur les frais qui lui est défavorable ;
   (b) la volonté de cette partie au différend de se conformer à une décision sur les frais qui lui est défavorable ;
   (c) l'effet que la fourniture de sûretés en garantie des frais peut avoir sur la capacité de cette partie au différend de maintenir sa plainte ou sa demande reconventionnelle, et
   (d) l'attitude des parties au différend.
3. Le tribunal arbitral précise les modalités pertinentes dans une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais et fixe un délai pour se conformer à l'ordonnance.
4. Si une partie au différend ne se conforme pas à une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais dans les 30 jours suivant ladite ordonnance ou dans tout autre délai fixé par lui, le tribunal arbitral peut suspendre la procédure. Si la procédure est suspendue pendant plus de 90 jours, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties au différend, clore la procédure par voie d'ordonnance.
5. Une partie au différend révèle dans les meilleurs délais toute modification significative des circonstances sur la base desquelles le tribunal arbitral a ordonné la fourniture de sûretés en garantie des frais.
6. Le tribunal arbitral peut à tout moment modifier ou révoquer son ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie au différend.

Article 29
Jonction

Lorsque deux plaintes ou plus ont été soumises à l'arbitrage séparément en vertu de l'art. 19 (Dépôt d'une plainte) et que les plaintes portent sur une même question de droit ou de fait et découlent d'événements ou circonstances identiques ou similaires, l'ensemble des parties au différend concernées peuvent convenir de joindre ces plaintes.

Article 30
Désistement

Si, après le dépôt d'une plainte en vertu de la présente section, l'investisseur partie au litige n'effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de 180 jours ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé avoir retiré sa plainte et s'être désisté de la procédure. À la demande de la Partie défenderesse et après notification aux parties au différend, le tribunal arbitral prend acte du désistement par voie d'ordonnance. Après que cette ordonnance a été rendue, la compétence du tribunal arbitral prend fin.

Article 31
Notification des documents

1. Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente section sont notifiés à l'Indonésie à l'adresse suivante :

   Directeur général des affaires juridiques et des traités internationaux
   Ministère des affaires étrangères
   Jl. Taman Pejambon No. 6
   Jakarta 10110
   INDONÉSIE

2. Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente section sont notifiés à la Suisse à l'adresse suivante :

Secrétariat d'État à l'économie SECO
Holzikofenweg 36
3003 Berne
SUISSE

SECTION DEUX
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES

Article 32
Champ d'application

La présente section s'applique au règlement des différends entre les Parties résultant de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord.

Article 33
Consultations

1. L'une ou l'autre Partie peut demander par écrit des consultations sur l'interprétation ou l'application du présent Accord. Si un différend surgit entre les Parties sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, il est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par voie de consultations.
2. Au cas où le différend n'est pas réglé par les moyens susmentionnés dans un délai de 6 mois à compter de la date où ces consultations ont été demandées par écrit et à moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'une ou l'autre Partie peut soumettre ce différend à un tribunal arbitral institué conformément à la présente section ou, si les Parties en conviennent ainsi, à tout autre tribunal international.

Article 34
Constitution du tribunal arbitral

1. La procédure d'arbitrage est engagée par une notification écrite adressée par une Partie (ci-après dénommée « Partie demanderesse ») à l'autre Partie (ci-après dénommée « Partie défenderesse ») par la voie diplomatique. La notification indique la mesure spécifique en cause et expose suffisamment en

détail le fondement juridique et factuel de la plainte (notamment les dispositions du présent Accord à examiner par le tribunal arbitral) pour énoncer clairement le problème.

2. Chaque Partie nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi désignés nomment un président qui est ressortissant d'une tierce partie entretenant des relations diplomatiques avec les Parties. Si l'une des Parties n'a pas nommé son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder à cette nomination dans les 2 mois suivant la notification d'arbitrage, l'arbitre est nommé, à la demande de cette dernière Partie, par le secrétaire général du CIRDI. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les 2 mois suivant leur nomination, le président est nommé, à la demande de l'une ou l'autre Partie, par le secrétaire général du CIRDI.
3. Si le secrétaire général du CIRDI est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le président de la Cour internationale de justice agit en qualité d'autorité de nomination. Si le président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations sont effectuées par le vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, elles le sont par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.
4. Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public, de droit de l'investissement international et de la résolution des différends relevant du droit de l'investissement international. Les arbitres sont indépendants des Parties ; ils n'ont de lien avec aucune d'elles et ne reçoivent d'instructions d'aucune d'elles.
5. Au cas où un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n'est plus à même d'exercer son mandat, un successeur est nommé de la même manière que celle prévue pour la nomination de l'arbitre initial ; il a les mêmes pouvoirs et devoirs que l'arbitre initial.
6. Chaque Partie supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé et de toute représentation juridique dans la procédure. Les frais du président du tribunal arbitral et les autres frais liés à la procédure d'arbitrage sont supportés à

parts égales par les Parties, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

Article 35
Siège de l'arbitrage

À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le siège de l'arbitrage est déterminé par le tribunal arbitral.

Article 36
Procédure d'arbitrage

1. Un tribunal arbitral institué en vertu de la présente section statue sur toutes les questions soumises par la Partie demanderesse et, sous réserve d'un quelconque accord entre les Parties, détermine sa propre procédure. À tout stade de la procédure, le tribunal arbitral peut suggérer aux Parties qu'elles règlent le différend à l'amiable.
2. Un tribunal arbitral institué conformément à l'art. 34 statue sur les questions en litige en se fondant sur les dispositions du présent Accord interprétées conformément aux règles applicables du droit international. En outre, il peut appliquer d'autres règles de droit international et des règles de droit interne dans tous les cas où cela est approprié au vu des questions à régler.
3. La sentence est rendue par écrit et contient les constatations de fait et de droit applicables. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties et chaque tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, EXCEPTIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 37
Conditions plus favorables

Si la législation de l'une des Parties ou des obligations internationales existant actuellement ou établies ultérieurement entre les Parties en sus du présent Accord aboutissent à une situation donnant aux investissements des investisseurs de l'autre Partie droit à un traitement plus favorable que celui qui leur est accordé en vertu du présent Accord, cette situation n'est pas affectée par le présent Accord.

Article 38
Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une personne morale de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si la personne morale est détenue ou contrôlée par un investisseur d'une tierce partie ou de la Partie qui refuse d'accorder les avantages et qu'elle n'a pas d'activités commerciales substantielles sur le territoire de cette autre Partie.
2. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages du présent Accord à un investisseur de l'autre Partie qui est une personne morale de cette autre Partie et aux investissements de cet investisseur si la personne morale est détenue ou contrôlée par des personnes d'une tierce partie et que la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard de cette tierce partie ou d'une personne de celle-ci, des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales qui interdisent toute transaction avec cette personne morale ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent Accord étaient accordés à cette personne morale ou à ses investissements.

Article 39
Transparence

1. Chaque Partie publie sans délai ou rend autrement accessible au public ses lois, réglementations et accords internationaux susceptibles d'affecter les investissements d'investisseurs de l'autre Partie.
2. Chaque Partie, à la demande de l'autre Partie, répond dans un délai raisonnable aux questions spécifiques de l'autre Partie et lui fournit des renseignements sur les sujets visés à l'al. 1.

Article 40
Divulgation de renseignements

1. Nonobstant l'art. 5 (Traitement national), une Partie peut exiger d'un investisseur de l'autre Partie ou de son investissement qu'il fournisse des renseignements concernant cet investissement aux seuls fins d'information ou de statistique. La Partie protège les renseignements commerciaux qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de son investissement. Aucune disposition du présent alinéa ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de révéler par ailleurs des renseignements dans le cadre de l'application équitable et de bonne foi de son droit.
2. Aucune disposition du présent Accord n'oblige l'une ou l'autre Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Article 41

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'encontre de l'autre Partie ou de ses investisseurs où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée, sur le territoire d'une Partie, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie, aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie de mesures :

(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public[13] ;

(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

(c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris celles qui se rapportent :

  (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à un contrat,

  (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,

  (iii) à la sécurité ;

(d) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou

(e) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.

---

[13] L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

Article 42

Mesures prudentielles

1. Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie d'adopter ou de maintenir, de manière non discriminatoire, des mesures se rapportant aux services financiers pour des raisons prudentielles[14], notamment pour :
   (a) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires et ayants droit de polices, des participants aux marchés financiers ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un établissement financier ;
   (b) assurer l'intégrité et la stabilité du système financier d'une Partie.
2. Les mesures prises par une Partie en vertu de l'al. 1 ne sont pas utilisées par cette Partie comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre du présent Accord.

Article 43

Promotion et facilitation des investissements

1. Sous réserve de ses lois et réglementations, chaque Partie s'efforce de coopérer en vue de faciliter les investissements entre les Parties, notamment :
   (a) en créant l'environnement nécessaire pour toutes les formes d'investissement ;
   (b) en simplifiant les procédures relatives aux demandes et approbations des investissements ;
   (c) en encourageant la diffusion d'informations relatives aux investissements, notamment les règles, réglementations, politiques et procédures en matière d'investissement, et

[14] Les Parties comprennent que le terme « raisons prudentielles » vise notamment le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité et de la responsabilité financière des fournisseurs individuels de services financiers, ainsi que de la sécurité et de l'intégrité financière et opérationnelle des systèmes de paiement et de compensation.

(d) en instaurant un mécanisme approprié, dans la mesure du possible, pour fournir une assistance et des services de conseil aux investisseurs, notamment la facilitation des licences d'exploitation et des permis.

2. Sous réserve de ses lois et réglementations, les activités de coopération visées à l'al. 1, let. (d), peuvent s'appuyer sur des accords ou arrangements existants en matière de coopération économique.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme affectant toute obligation prévue par les dispositions du chapitre II (Protection des investissements), ou faisant l'objet ou affectant autrement toute procédure de résolution des différends en vertu du présent Accord.

Article 44

Entrée en vigueur, durée et extinction

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception, par la voie diplomatique, de la deuxième notification confirmant que les deux Parties ont satisfait à leurs exigences légales relatives à l'entrée en vigueur des accords internationaux.
2. Nonobstant l'art. 2 (Champ d'application du présent Accord), une plainte peut être déposée en vertu des dispositions de la Convention du 6 février 1974 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République indonésienne concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, dont l'extinction a pris effet le 8 avril 2016 (ci-après dénommée « accord antérieur »), conformément aux règles et procédures établies par l'accord antérieur, et à la condition qu'un an au plus se soit écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
3. Le présent Accord peut être amendé par convention écrite entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon la même procédure que celle fixée à l'al. 1.
4. Le présent Accord entre en vigueur pour une période de 10 ans ; il reste en vigueur par la suite, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre

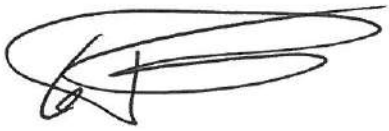
Partie son intention d'y mettre fin. Le présent Accord prend fin 1 an après réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie.

5. S'agissant des investissements effectués avant la date d'extinction de l'Accord, les dispositions du présent Accord continuent de s'appliquer pendant une période supplémentaire de 10 ans à compter de cette date.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Davos, le vingt-quatre mai 2022 , en deux exemplaires originaux, chacun en français, en indonésien et en anglais, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour
le Conseil fédéral suisse



Pour le Gouvernement
de la République d'Indonésie



ANNEXE A
EXPROPRIATION

Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit :

1. Une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ne peuvent constituer une expropriation à moins qu'elles ne portent atteinte à un droit de propriété corporel ou incorporel ou à un intérêt dans un bien faisant partie de l'investissement.
2. L'art. 7 (Expropriation), al. 1, vise deux situations. La première est l'expropriation directe, c'est-à-dire lorsque l'investissement est nationalisé ou fait l'objet de toute autre forme d'expropriation directe par transfert formel du titre de propriété ou saisie inconditionnelle.
3. La deuxième situation visée à l'art. 7 (Expropriation), al. 1, est l'expropriation indirecte, c'est-à-dire lorsqu'une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ont un effet équivalent à celui d'une expropriation directe sans qu'il y ait transfert formel du titre de propriété ni saisie inconditionnelle.
   (a) Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie, dans une situation de fait donnée, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen des faits qui tient compte, entre autres, des facteurs suivants :
      (i) l'impact économique de la mesure gouvernementale, même si le fait qu'une mesure ou une série de mesures prises par une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d'un investissement n'établit pas à lui seul qu'il y a eu expropriation indirecte ;
      (ii) la durée de la mesure ou de la série de mesures prises par une Partie ;
      (iii) l'étendue de l'atteinte portée par la mesure gouvernementale aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l'investissement[15], et

[15] Il est entendu que la question de savoir si les attentes sous-tendant l'investissement de l'investisseur sont raisonnables dépend, dans la mesure de leur pertinence, de facteurs comme

(iv) la nature de la mesure gouvernementale, notamment son objectif et si cette mesure est disproportionnée par rapport à l'intérêt public.

(b) Il est entendu que, sauf dans de rares circonstances où l'impact d'une mesure ou d'une série de mesures est si grave au regard de leur but qu'elles semblent manifestement excessives, les mesures réglementaires non discriminatoires d'une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, tels que la santé publique, la sécurité et l'environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.

---

le fait que le gouvernement ait ou non donné à l'investisseur des assurances écrites contraignantes ainsi que la nature et la portée de toute réglementation gouvernementale ou le potentiel de réglementation gouvernementale dans le secteur concerné.

ANNEXE B
CODE DE CONDUITE DES ARBITRES

Responsabilités dans le processus

1. Les arbitres évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d'intérêts directs et indirects et observent des normes de conduite strictes, afin que l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres se conforment aux obligations prévues aux par. 17, 18 et 20.

Obligation de déclaration

2. Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre du présent Accord, le candidat déclare l'ensemble des intérêts, relations et sujets susceptibles d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et sujets.
3. Une fois sélectionné, l'arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence d'intérêts, de relations et de sujets visés au par. 2 et les déclare en les communiquant par écrit aux parties au différend. L'obligation de déclaration est un devoir permanent qui exige de l'arbitre qu'il déclare l'ensemble des intérêts, relations et sujets susceptibles de survenir à toute étape de la procédure.

Exécution des fonctions par les arbitres

4. L'arbitre se conforme aux dispositions du chapitre III (Règlement des différends) et aux règles de procédure applicables.
5. Une fois sélectionné, l'arbitre s'acquitte entièrement et efficacement de ses fonctions tout au long de la procédure, en faisant preuve d'équité et de diligence.

6. L'arbitre n'empêche pas les autres arbitres de participer à l'ensemble des aspects de la procédure.
7. L'arbitre ne va pas au-delà de la demande des parties au différend et ne peut déléguer à quiconque la responsabilité de rendre des décisions.
8. L'arbitre prend toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les par. 1, 2, 3, 18, 19 et 20, et s'y conforment.
9. Une fois le tribunal arbitral constitué, l'arbitre n'a pas de contacts *ex parte* concernant la procédure.
10. L'arbitre ne communique pas sur des violations effectives ou potentielles par un autre arbitre, à moins que la communication soit destinée aux deux parties au différend ou soit nécessaire pour déterminer si ledit arbitre a violé ou risque de violer la présente Annexe.

Indépendance et impartialité des arbitres

11. L'arbitre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et évite toute apparence de manquement à la déontologie ou de parti pris.
12. L'arbitre ne se laisse pas influencer par l'intérêt propre, la pression extérieure, les considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou une partie au différend, ou la crainte des critiques.
13. L'arbitre ne peut, directement ou indirectement, assumer une obligation ou accepter un avantage qui, d'une manière quelconque, entraverait ou semblerait entraver la bonne exécution de ses fonctions.
14. L'arbitre n'use pas de la fonction qu'il occupe au sein du tribunal arbitral pour servir des intérêts personnels ou privés. Il s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. Il fait tout son possible pour empêcher ou dissuader quiconque de se prétendre dans cette situation.
15. L'arbitre ne permet pas que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
16. L'arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait

raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris.

Obligations dans certaines situations

17. L'arbitre ou l'ancien arbitre s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il avait un parti pris dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il tirerait un avantage de la décision ou de la sentence rendue par le tribunal arbitral.

Respect de la confidentialité

18. L'arbitre ou l'ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure ou obtenus au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure et dans la mesure où la divulgation peut être exigée par des prescriptions légales ou constitutionnelles ; il ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autrui ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
19. L'arbitre ne divulgue pas une sentence du tribunal arbitral, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée.
20. L'arbitre ou l'ancien arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un tribunal arbitral ou l'opinion d'un arbitre, sauf si des prescriptions légales ou constitutionnelles l'exigent.



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE SWISS FEDERAL COUNCIL
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

PREAMBLE

The Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Parties" or individually as a "Party";

DESIRING to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States;

RECOGNISING that the creation of a business-friendly environment will be conducive to the stimulation of business initiative for increased investments by investors of one Party in the territory of the other Party;

ACKNOWLEDGING the important contribution that investments can make to sustainable development, and seeking to promote and facilitate such investments within the territories of the Parties;

RECOGNISING that the encouragement and reciprocal protection of investments can stimulate business initiative, foster the inflow of capital and technology, and increase economic development and prosperity in both States;

CONVINCED that these objectives can be achieved without weakening health, safety, labour and environmental standards of general application;

AFFIRMING the mutual supportiveness of investment, environment and labour policies in this respect;

REAFFIRMING their commitment to the principles and objectives set out in the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights, including democracy, the rule of law, human rights and fundamental freedoms;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

CHAPTER I
DEFINITIONS AND SCOPE

Article 1
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. "Freely convertible currency" means a currency, which is widely traded in international foreign exchange market and widely used in international transaction;

2. "ICSID" means the International Centre for Settlement of Investment Disputes;

3. "ICSID Additional Facility Rules" means the Rules Governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the International Centre for Settlement of Investment Disputes, as amended and in effect on 10 April 2006;

4. "ICSID Arbitration Rules" means the Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules), as amended and in effect on 10 April 2006;

5. "ICSID Convention" means the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, done at Washington on 18 March 1965;

6. "Investment" means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment of capital or other resources, the

expectation of gain or profit, the assumption of risk or certain duration. Forms that an investment may take include:

(a) an enterprise;

(b) shares, stocks and other forms of equity participation in an enterprise;

(c) bonds, debentures and other debt instruments and loans;[1,2]

(d) intellectual property rights;

(e) claims to money or to any contractual performance related to a business and having financial value;[3]

(f) turnkey, construction, management, production concession, revenue-sharing and other similar contracts;

(g) licences, authorisations, permits and similar rights conferred in accordance with the Party's laws;[4] and

---

[1] Some forms of debt, such as bonds, debentures and long-term notes, are more likely to have the characteristics of an investment, while other forms of debt, such as claims to payment that are immediately due and result from the sale of goods or services, are less likely to have such characteristics.

[2] A loan issued by one Party to the other Party is not an investment.

[3] For greater certainty, investment does not mean claims to money that arise solely from:
(a) commercial contracts for sale of goods or services; or
(b) the extension of credit in connection with such commercial contracts.

[4] Whether a particular type of licence, authorisation, permit or similar instrument (including a concession to the extent that it has the nature of such an instrument) has the characteristics of an investment depends on such factors as the nature and extent of the rights that the holder has under the Party's law. Among such instruments that do not have the characteristics of an investment are those that do not create any rights protected under the Party's law. For greater certainty, the foregoing is without prejudice to whether any asset associated with such instruments has the characteristics of an investment.

(h) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges.

The term "investment" does not include an order or judgment entered in a judicial or administrative action or an arbitral award made in an arbitral proceeding.

For the purpose of the definition of investment in this Article, returns that are invested shall be treated as investments and any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investments.

7. "Investor" means:

(a) a natural person who, under to the law of a Party, is a national of that Party; or

(b) a legal entity, including companies, corporations, business associations and other organisations, which is constituted or otherwise duly organised under the law of that Party and has its seat, together with real economic activities, in the territory of the same Party;

that has made an investment;

8. "Locally established enterprise" means an enterprise owned or controlled directly or indirectly by an investor of a Party, established in the territory of the other Party. An enterprise is:

(a) owned by natural persons or enterprises of a Party if more than 50 per cent of the equity interest in it is beneficially owned by natural persons or enterprises of that Party;

(b) controlled by natural persons or enterprises of a Party if such natural persons or enterprises have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.

9. "New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, adopted at the United Nations in New York on 10 June 1958;

10. "Returns" means amounts yielded by or derived from an investment, including, but not limited to, any profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees;

11. "Territory" means the territory of a Party as defined by the laws of the Party concerned in accordance with international law;

12. "UNCITRAL Arbitration Rules" means the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law, as adopted by the United Nations General Assembly on 15 December 1976.

Article 2

Scope of Agreement

1. This Agreement applies to investments in the territory of one Party, which have been established or acquired and, where applicable, admitted[5] in accordance with its laws and regulations by investors of the other Party, whether prior to or after the entry into force of this Agreement.

[5] For greater certainty, in the case of Indonesia, "admitted in accordance with its laws and regulations" may include a requirement for specific approval in writing.

2. This Agreement does not apply to claims or disputes arising from events, which occurred[6] prior to its entry into force.

3. This Agreement shall not apply to government procurement.

4. Article 5 (National Treatment) shall not apply to subsidies or grants provided by a Party, including government-supported loans, guarantees, and insurances, or to any conditions attached to the receipt or continued receipt of such subsidies or grants, whether or not such subsidies or grants are offered exclusively to investors of the Party or investments of investors of the Party.

Article 3

Taxation Measures

1. Except as provided in this Article, nothing in this Agreement shall apply to taxation measures.

2. This Agreement shall only grant rights or impose obligations with respect to taxation measures where:

   (a) they are granted or imposed under Article 7 (Expropriation); or

   (b) they are granted or imposed under Article 9 (Transfers).

[6] For greater certainty, this Agreement shall not bind a Party in relation to an act or fact that took place or a situation that ceased to exist before the date of entry into force of this Agreement for that Party.

3. Where Paragraphs 2(a) or 2(b) apply, Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the other Party) of Chapter III (Dispute Settlement), shall also apply in respect of taxation measures.

4. Where an investor claims that the disputing Party has breached Article 7 (Expropriation) or Article 9 (Transfers) by the adoption or enforcement of a taxation measure, the competent authorities of the disputing Party may request consultations with the competent authorities of the non-disputing Party at the time that the disputing Party receives the investor's notice of intent under Article 19 (Submission of a Claim). The competent authorities of the Parties shall hold consultations with a view to determining whether the taxation measure constitutes an expropriation according to Article 7 (Expropriation) or whether Article 9 (Transfers) has been breached. Any arbitral tribunal that may be established in accordance with Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the other Party) of Chapter III (Dispute Settlement) to consider taxation measures, shall accept as binding the decision of the competent authorities under this Paragraph.

   If the competent authorities of the Parties fail to determine whether the taxation measure constitutes an expropriation according to Article 7 (Expropriation) or whether Article 9 (Transfers) has been breached within 360 days of the date of receipt of the request for consultations by the non-disputing Party, the investor may submit its claim to arbitration under Article 19 (Submission of a Claim).

5. In assessing whether a measure related to taxation constitutes expropriation, the following considerations shall be taken into account:

   (a) the imposition of taxes does not generally constitute expropriation. The mere introduction of new taxation measures or the imposition of taxes

in more than one jurisdiction in respect of an investment, does not in and of itself constitute expropriation;

(b) enforcement activities of the tax laws including seizure of property for the purpose of tax collection do not generally constitute expropriation;

(c) taxation measures which are consistent with internationally recognized tax policies, principles and practices do not generally constitute expropriation. In particular, taxation measures aimed at preventing the avoidance or evasion of taxes should not be considered to be expropriatory; and

(d) taxation measures which are applied on a non-discriminatory basis, as opposed to being targeted at investors of a particular nationality or specific individual taxpayers, are not likely to constitute expropriation. A taxation measure should not constitute expropriation if, when the investment is made, it was already in force and information about the measure was made public or otherwise made publicly available.

6. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party under any tax convention. In the event of any inconsistency between this Agreement and any such tax convention that convention shall prevail to the extent of the inconsistency. The competent authorities under that convention shall have the sole responsibility for determining whether any inconsistency exists between this Agreement and that convention.

7. For the purposes of this Article:

(a) "tax convention" in Paragraph 6 means a convention for the avoidance of double taxation or other international taxation agreement or arrangement to which the Parties are party;

(b) "competent authorities" in Paragraph 4 means:

(i) with respect to Indonesia, the Minister of Finance or his or her authorised representative;

(ii) with respect to Switzerland, The Head of the Federal Department of Finance, or his or her authorised representative.

CHAPTER II
INVESTMENT PROTECTION

Article 4
Treatment of Investment

1. Each Party shall in its territory accord to investments of investors of the other Party fair and equitable treatment as well as full protection and security in accordance with this Article.

2. A Party breaches the obligation of fair and equitable treatment referenced in Paragraph 1 if a measure or series of measures constitutes:

   (a) a denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;

   (b) a fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency, in judicial and administrative proceedings;

   (c) manifest arbitrariness;

   (d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief; or

   (e) abusive treatment, such as coercion, duress or harassment.

3. The Parties shall, upon request of a Party, review the content of the obligation to provide fair and equitable treatment, pursuant to the procedure for amendments set out in Article 44 (Entry into Force, Duration and Termination), in particular, whether treatment other than those listed in Paragraph 2 can also constitute a breach of fair and equitable treatment.

4. Full protection and security requires each Party to take such measures as may be reasonably necessary to ensure the protection and security of the investment.

5. When applying the above fair and equitable treatment obligation, the arbitral tribunal may take into account whether a Party made a specific written commitment to an investor to induce an investment, that created a legitimate expectation, and upon which the investor relied in deciding to make or maintain the investment, but that the Party subsequently frustrated.

6. The mere fact that a Party takes or fails to take an action that may be inconsistent with an investor's expectations does not constitute a breach of this Article, even if there is loss or damage to the investment as a result.

7. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that there has been a breach of this Article.

Article 5

National Treatment

1. Each Party shall in its territory accord to investments of investors of the other Party treatment no less favourable than that which it accords, in like circumstances[7], to investments of its own investors.[8]

---

[7] For greater certainty, whether treatment is accorded in "like circumstances" under Article 5 (National Treatment) or Article 6 (Most Favoured Nation) depends on the totality of the circumstances, including the relevant economic or business sector or sectors concerned and whether the relevant treatment distinguishes between investments on the basis of legitimate public welfare objectives.

[8] For greater certainty, this Article shall not apply to any measure relating to the divestment of investment where the foreign investors were made aware, as of the date or during the

2. Each Party shall in its territory accord to investors of the other Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment, extension, or disposal of their investments, treatment no less favourable than that which it accords, in like circumstances, to its own investors.

3. For greater certainty, the treatment to be accorded by a Party under Paragraph 1 and 2 means, with respect to a regional level of government, treatment no less favourable than the most favourable treatment accorded, in like circumstances, by that regional level of government to investors, and to investments of investors, of the Party of which it forms a part.

Article 6

Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Party shall in its territory accord to investments of investors of the other Party treatment no less favourable than the treatment it accords, in like circumstances, to investment of investors of any non-Party.

2. Each Party shall in its territory accord to investors of the other Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment, extension or disposal of their investments, treatment no less favourable than that which it accords, in like circumstances, to investors of any non-Party.

3. Treatment as referred to in Paragraphs 1 and 2 shall not include:
   (a) existing bilateral or regional investment agreements that were signed or have entered into force prior to the entry into force of this Agreement;

---

registration of their investment, that their investment would be divested in the future in accordance with the host Party's domestic legislation.

(b) arrangements with a non-Party in the same geographical region designed to promote regional cooperation in the economic, social, labour, industrial or monetary fields within the framework of specific projects;

(c) existing or future agreements establishing a free trade area, a customs union or a common market according preferential treatment by a Party to investors of any non-Party; or

(d) existing or future agreements on the avoidance of double taxation or any other tax conventions.

4. For greater certainty, Paragraphs 1 and 2 shall not apply to international dispute resolution procedures or mechanisms in other international agreements, and shall not be construed as granting to investors dispute resolution procedures or mechanisms other than those set out in Section One (Settlement of Disputes between a Party and an Investor of the Other Party) of Chapter III (Dispute Settlement).

5. For greater certainty, substantive obligations in other international investment agreements concluded by a Party do not in themselves constitute most-favoured-nation treatment as referred to in Paragraphs 1 and 2 and thus cannot give rise to a breach of this Article in the absence of concrete measures adopted or maintained by that Party pursuant to such obligations.

Article 7

Expropriation

1. Neither Party shall expropriate or nationalise an investment of an investor of the other Party either directly or indirectly through measures equivalent

to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as "expropriation"), except:

(a) for a public purpose;

(b) in a non-discriminatory manner;

(c) on payment of prompt, adequate and effective compensation in accordance with Paragraphs 3 and 4; and

(d) in accordance with due process of law.

This Paragraph shall be interpreted in accordance with Annex A on Expropriation.

2. At the request of an investor, any measure of expropriation or valuation will be reviewed by a judicial or other independent authority in the manner prescribed by the laws of the Party taking the measure.

3. Compensation referred to in Paragraph 1(c) shall:

(a) be paid without delay[9];

(b) be equivalent to the fair market value[10] of the expropriated investment immediately before the expropriation took place (the date of expropriation) or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is earlier;

---

[9] The Parties understand that there may be legal and administrative processes that need to be observed before payment can be made.

[10] The valuation of fair market value of the expropriated investment shall exclude any speculative or windfall profits.

(c) not reflect any change in value occurring because the intended expropriation had become known earlier; and

(d) be effectively realizable and freely transferable in accordance with Article 9 (Transfers).

4. The amount of compensation shall include interest at an appropriate market rate, from the date of expropriation until the date of payment. Valuation criteria used to determine fair market value may include going concern value, asset value including the declared tax value of tangible property and other criteria, as appropriate.

5. Notwithstanding Paragraphs 1, 3 and 4, any measure of direct expropriation relating to land, which shall be defined in the legislation of the expropriating Party, shall be for a public purpose and upon payment of compensation at fair market value, in accordance with the aforesaid legislation.

6. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* in Annex 1C to the WTO Agreement.[11]

[11] For greater certainty, the Parties recognised for the purpose of this Article, the term "revocation" of intellectual property rights includes the cancellation or nullification of such rights, and the term "limitation" of intellectual property rights includes exceptions to such rights.

Article 8
Compensation for Losses

1. Investors of a Party whose investments in the territory of the other Party suffer losses owing to war or other armed conflict, civil disturbances, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar situations in the territory of the latter Party, shall be accorded by the latter Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, if any, no less favourable than that which the latter Party accords to investors of any non-Party or to its own investors, whichever is more favourable.

2. Notwithstanding Paragraph 1, an investor of a Party who, in any of the situations referred to in that Paragraph, suffers a loss in the territory of the other Party resulting from:

   (a) requisitioning of the investment or part thereof by its forces or authorities; or

   (b) destruction of the investment or part thereof by its forces or authorities which was not required by the necessity of the situation,

   shall be accorded by the other Party restitution or compensation. With respect to compensation, the value shall not exceed the loss suffered.

Article 9
Transfers

1. Each Party shall permit all transfers relating to investments of an investor of the other Party in its territory to be made freely and without delay into and out of its territory. Such transfers include:

(a) contributions to capital, including the initial contribution, profits, capital gains, dividends, royalties, technical assistance and technical and management fees, interest and other current income accruing from any investment;

(b) proceeds from the total or partial sale or liquidation of any investment;

(c) payments made under a contract, entered into by an investor, or its investment, including payments made pursuant to a loan agreement;

(d) payments made pursuant to Article 7 (Expropriation) and Article 8 (Compensation for Losses);

(e) earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with that investment; and

(f) payments arising out of the settlement of a dispute under Chapter III (Dispute Settlement).

2. Unless otherwise agreed with the investor, each Party shall permit such transfers to be made in a freely convertible currency at the market rate of exchange prevailing at the time of transfer.

3. Nothing in this Article shall be construed to prevent a Party from applying, in an equitable, non-discriminatory manner and in good faith, its laws relating to:

(a) bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors;

(b) issuing, trading, or dealing in securities, futures, options, or derivatives;

(c) criminal or penal offenses;

(d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities;

(e) ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative proceedings;

(f) social security, public retirement, or compulsory savings schemes;

(g) severance entitlements of employees; or

(h) taxation.

4. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the members of the International Monetary Fund under the *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*, including the use of exchange actions, which are in conformity with the *Articles of Agreement of the International Monetary Fund.*

5. A transfer shall be deemed to have been made "without delay" if effected within such a period as is normally required for the completion of transfer formalities imposed by the central bank and other relevant authorities of a Party. The said period shall commence on the day on which the request for transfer is submitted and may on no account exceed two months. Such formalities shall apply to investors without discrimination.

Article 10
Restrictions to Safeguard Balance of Payments

1. Where a Party is in serious balance of payments and external financial difficulties or under threat thereof or if, in exceptional circumstances, payments and capital movements cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies, it may adopt or maintain restrictions on payments or capital movements related to investments.

2. Restrictions adopted or maintained under Paragraph 1 shall:

   (a) be consistent with the *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*;

   (b) avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests of the other Party;

   (c) not exceed those necessary to deal with the circumstances described in Paragraph 1;

   (d) be temporary and be phased out progressively as the situation specified in Paragraph 1 improves;

   (e) be applied on a national treatment basis;

   (f) ensure that the other Party is treated as favourably as any non-Party;

   (g) not restrict payments or transfers for current transactions, unless the imposition of such measures complies with the procedures stipulated in the *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*.

Article 11
Subrogation

1. If a Party, or any agency, institution, statutory body or corporation designated by the Party, makes a payment to an investor of the Party under a guarantee, a contract of insurance or other form of indemnity that it has entered into on non-commercial risks with respect to an investment, the other Party in whose territory the investment was made shall recognise the subrogation or transfer of any rights the investor would have possessed under this Agreement with respect to the investment but for the subrogation, and the investor shall be precluded from pursuing these rights to the extent of the subrogation.

2. The subrogated or transferred rights or claims shall not be greater than the original rights or claims of the said investor.

Article 12
Right to Regulate

1. For the purpose of this Agreement, the Parties reaffirm their right to regulate within their territories necessary to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health, social services, public education, safety, environment or public morals, social or consumer protection, privacy and data protection, and the promotion and protection of cultural diversity.

2. For greater certainty, the mere fact that a Party regulates, including through a modification to its laws, in a manner which negatively affects an investment or interferes with an investor's expectations, including its expectations of profits, does not amount to a breach of an obligation under this Agreement.

Article 13
Corporate Social Responsibility

Each Party shall encourage legal entities operating within its territory or subject to its jurisdiction to voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognized standards, guidelines, and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are supported by that Party.

Article 14
Measures against Corruption

1. An investor of a Party and its investments shall not, prior to the establishment of an investment in the territory of the other Party or afterwards, offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to a public official of the other Party for that official or for a third party, in order that the official or third party act or refrain from acting in relation to the performance of official duties, in order to achieve any favour in relation to an investment.

2. An investor of a Party and its investments, in the territory of the other Party, shall not be complicit in any act described in Paragraph 1, including incitement and aiding to commit such acts.

CHAPTER III
DISPUTE SETTLEMENT

SECTION ONE
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN A PARTY AND AN INVESTOR OF THE OTHER PARTY

Article 15
Scope

1. This Section shall apply to disputes between a Party and an investor of the other Party ("disputing parties") concerning an alleged breach of an obligation of the former under this Agreement which causes loss or damage to the investor (hereinafter referred to as an "investment dispute").

2. This Section shall not apply to investment disputes, which have occurred prior to the date of entry into force of this Agreement.

3. A natural person possessing the nationality or citizenship of a Party may not pursue a claim against that Party under this Section.

4. A legal entity of a Party and its subsidiaries may not pursue a claim against the other Party under this Section, if the legal entity is owned or controlled by an investor of a non-Party, and such other Party does not maintain diplomatic relations with the non-Party.

Article 16

Transparency of Arbitral Proceedings

1. Subject to Paragraph 2, the disputing Party shall make publicly available all awards and decisions produced by the arbitral tribunal.

2. Any information specifically designated as confidential that is submitted to the arbitral tribunal or the disputing parties shall be protected from disclosure to the public.

3. Any of the disputing parties that intend to use information designated as confidential information in a hearing shall so advise the arbitral tribunal. The arbitral tribunal shall make appropriate arrangements to protect the information from disclosure.

4. The hearings of the arbitral tribunal shall be closed for the duration of any discussion of confidential information. Otherwise, the hearing shall be open to the public, unless the disputing parties decide otherwise.

5. The arbitral tribunal shall not require a disputing party to provide confidential business information or confidential information the disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the security interest of the disputing Party, or which would prejudice the legitimate commercial interests of particular legal entities, public or private.

Article 17
Consultations

1. In the event of an investment dispute, the disputing parties shall initially seek to resolve the dispute with a view towards reaching an amicable settlement through consultation. Such consultations shall be initiated by a written request for consultations delivered by the disputing investor to the disputing Party.

2. With the objective of resolving a dispute through consultations, the written request for consultations shall contain information regarding the legal and factual basis for the investment dispute, including the name and address of the disputing investor, the provisions of this Agreement alleged to have been breached, the relief sought, the estimated amount of damages claimed, and evidence establishing that the disputing investor is an investor of the other Party and that it owns or controls the investments.

Article 18
Mediation

1. If the investment dispute cannot be resolved through consultations, a disputing party may request the other disputing party to have recourse to a non-binding, third party procedure, such as good offices, conciliation or mediation. Such process shall be initiated by a written request delivered by a disputing party to the other disputing party and requires the consent of both disputing parties.

2. The process under this Article can only be initiated by a disputing party within 6 months from the date of receipt of the written request for consultations by the disputing Party.

3. Expenses incurred in relation to the process under this Article shall be borne equally by the disputing parties. Each disputing party shall bear its own expenses derived from the participation in the process.

Article 19
Submission of a Claim

1. If an investment dispute cannot be resolved within 12 months from the receipt of the written request for consultations by the disputing Party, unless the disputing parties agree otherwise, the disputing investor may submit, on its own behalf or on behalf of its locally established enterprise[12], the dispute to the courts or to the administrative tribunals of the Party concerned or to international arbitration. In the latter event, the disputing investor has the choice between any of the following rules:

   (a) the ICSID Convention and the ICSID Arbitration Rules, provided that the disputing Party and the Party of the disputing investor are parties to the ICSID Convention;

   (b) the ICSID Additional Facility Rules, provided that either the disputing Party or the Party of the disputing investor is a party to the ICSID Convention;

   (c) the UNCITRAL Arbitration Rules; or

   (d) any other arbitral institutions or under any other arbitration rules, if the disputing parties so agree.

[12] For greater certainty, an enterprise may not itself submit a claim against that Party in which it is established.

2. In case of any conflict between the provisions of this Agreement and the provisions of the applicable arbitration rules, the provisions of this Agreement shall prevail to the extent of any such inconsistency.

3. Each Party hereby consents to the submission of a dispute to arbitration under Paragraph 1 in accordance with the provisions of this Section, conditional upon the requirements for such submission defined in this Article.

4. The consent under Paragraph 3 and the submission of a claim to arbitration under this Section shall satisfy the requirements of:

   (a) Chapter II of the ICSID Convention (Jurisdiction of the Centre) and the ICSID Additional Facility Rules for written consent of the parties to the dispute; and

   (b) Article II of the New York Convention for an "agreement in writing".

5. The disputing investor may only submit the claim to arbitration if the disputing investor, cumulatively:

   (a) provides a written notice to the disputing Party of its intent to submit the dispute to such arbitration at least 90 days before the claim is submitted, which contains information regarding the legal and factual basis of the investment dispute provided by the disputing investor in its request for consultations and any changes to the information therein;

   (b) delivers to the disputing Party, with the submission of a claim, its consent to the settlement of the dispute in the arbitration in accordance with the procedures set out in this Section;

   (c) does not identify a measure in its claim that was not identified in its request for consultations;

(d) withdraws or discontinues any existing proceeding before a tribunal or court under domestic or international law with respect to a measure alleged to constitute a breach referred to in its claim; and

(e) waives its right to raise any claim or initiate any proceeding before a tribunal or court under domestic or international law with respect to a measure alleged to constitute a breach referred to in its claim.

Letters (d) and (e) above do not apply for injunctive, declaratory or other non-pecuniary legal remedy provided that the action is brought for the sole purpose of preserving the disputing investor's or the enterprise's rights and interests during the pendency of the arbitration.

6. A claim may only be submitted to arbitration under this Chapter if no final award concerning the same measure as alleged to breach the provisions of Chapter II (Investment Protection) has been rendered in a claim submitted by the disputing investor to another arbitral tribunal established pursuant to this Section, or any other treaty including investment protection.

7. In the event that the investor has not submitted the dispute to international arbitration pursuant to Paragraph 1 within 24 months of the date of receipt by the disputing Party of the written request for consultations, the investor shall be deemed to have withdrawn its request for consultations and may no longer submit the same dispute to international arbitration pursuant to Paragraph 1. This period may be extended by written agreement between the disputing parties before such period has expired.

8. The consent of the Parties to the submission of a dispute to arbitration under Paragraph 1 in accordance with the provisions of this Section, shall be

subject to the condition that the investment dispute is submitted within five years of the time at which the disputing investor became aware, or should have reasonably become aware, of a breach of an obligation under this Agreement causing loss or damage to the disputing investor or its investment. This period may be extended by written agreement between the disputing parties before such period has expired.

Article 20

Third-Party Funding

1. The disputing parties shall notify the arbitral tribunal of the name and address of the third-party funder if they benefit from third-party funding.

2. Such notification shall be made at the time of submission of a claim, or without delay as soon as the third-party funding is agreed, donated or granted, as applicable.

3. If the disputing parties fail to disclose third party funding under this Article, the arbitral tribunal may consider the conduct of the disputing parties as a factor in allocating costs or order the suspension or termination of the proceedings.

Article 21

Constitution of the Arbitral Tribunal

1. Unless the disputing parties otherwise agree, the arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators, who shall not be nationals or permanent residents of either Party. Each disputing party shall appoint one arbitrator and the appointed arbitrators shall agree upon a third arbitrator, who shall be the chairman of the arbitral tribunal. The chairman of the arbitral tribunal

shall be a national of a non-Party which has diplomatic relations with the disputing Party and the non-disputing Party.

2. If an arbitral tribunal has not been established within 90 days from the date on which the claim was submitted to arbitration, either because a disputing party failed to appoint an arbitrator or because the appointed arbitrators failed to agree upon the chairman, the Secretary-General of ICSID, upon request of either disputing party, shall appoint, at his own discretion, the arbitrator or arbitrators not yet appointed. If the Secretary-General is a national or permanent resident of either Party, or he or she is otherwise unable to act, the Deputy Secretary-General of ICSID, who is not a national or permanent resident of either Party, may be invited to make the necessary appointments.

3. The arbitrators shall have experience or expertise in public international law, international investment law and the resolution of disputes arising under international investment law. The arbitrators shall be independent from the Parties and the disputing investor, and not be affiliated to or receive instructions from any of them.

4. Where any arbitrator appointed as provided for in this Article resigns or becomes unable to act, a successor shall be appointed in the same manner as prescribed for the appointment of the original arbitrator, and the successor shall have all the powers and duties of the original arbitrator.

5. Arbitrators appointed under this Section shall comply with the Code of Conduct of Arbitrators in Annex B of this Agreement.

Article 22
Governing Law and Joint Interpretation

1. An arbitral tribunal established in conformity with Article 21 (Constitution of the Arbitral Tribunal) shall decide the issues in dispute based on the provisions of this Agreement interpreted in accordance with applicable rules of international law. In addition, it may apply other rules of international law and rules of domestic law wherever appropriate in light of the issues to be resolved.

2. Where concerns arise as regards matters of interpretation of a provision of the Agreement, the Parties may adopt a joint interpretation. Such joint interpretation of the respective provision shall be binding on an arbitral tribunal established under this Chapter. The Parties may decide that this joint interpretation shall have binding effect from a specific date.

Article 23
Seat of Arbitration

Unless the disputing parties otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine the seat of arbitration in accordance with the applicable arbitration rules, provided that the seat shall be in the territory of a State that is a party to the New York Convention.

Article 24
Arbitral Proceedings

1. Where issues relating to jurisdiction or admissibility are raised as preliminary objections, an arbitral tribunal shall decide the matter before proceeding to the merits.

2. The disputing Party may, no later than 45 days after the constitution of the arbitral tribunal, file as a preliminary objection that a claim is excluded under Article 15 (Scope of Agreement). The disputing Party may also file an objection that a claim is otherwise outside of the jurisdiction or competence of the arbitral tribunal or any other objection, for example, that a claim is frivolous or manifestly without legal merit, even if the facts alleged were assumed to be true. The disputing Party shall specify as precisely as possible the basis for the objection. This is without prejudice to a disputing Party's ability to raise such an objection at a later stage in the proceedings.

3. The arbitral tribunal shall address any such objection as a preliminary question apart from the merits of the claim. The disputing parties shall be given a reasonable opportunity to present their views and observations to the arbitral tribunal. If the arbitral tribunal decides that the claim is excluded under Article 15 (Scope of Agreement), or is otherwise not within the jurisdiction or competence of the arbitral tribunal, or if it accepts any other objection, it shall render an award or a decision to that effect.

4. The arbitral tribunal shall decide on an expedited basis any preliminary objection raised under this Article. The arbitral tribunal shall suspend any proceedings on the merits and issue a decision or award on the objection, stating the grounds therefore, no later than 150 days after the date of the request. However, if a disputing party requests a hearing, the arbitral

tribunal may take an additional 30 days to issue the decision or award. Regardless of whether a hearing is requested, an arbitral tribunal may, on a showing of extraordinary cause, delay issuing its decision or award by an additional brief period, which may not exceed 30 days.

Article 25
Diplomatic Protection

Neither Party shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its investors and the other Party shall have consented to submit or have submitted to arbitration under this Section, unless such other Party has failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute. Diplomatic protection, for the purposes of this Article, shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.

Article 26
Awards

1. Where an arbitral tribunal makes a final award against a disputing Party, the arbitral tribunal may award, separately or in combination, only:

   (a) monetary damages and any applicable interest; and

   (b) restitution of property, provided that the disputing Party may pay monetary damages and any applicable interest, representing the fair market value of the property at the time immediately before the expropriation or impending expropriation became known, whichever is earlier, in lieu of restitution.

2. An arbitral tribunal may also award costs of the proceedings and costs of legal representation and assistance in accordance with this Section and the applicable arbitration rules.

3. An arbitral tribunal may not award punitive damages.

4. The award shall be binding and shall not be subject to any review mechanism other than those provided for in the ICSID Convention or other applicable arbitration rules on which the arbitral proceedings chosen by the disputing investor are based.

5. A disputing investor may not seek enforcement of a final award until:

   (a) in the case of a final award under the ICSID Convention:

      (i) 120 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has requested revision or annulment of the award; or

      (ii) revision or annulment proceedings have been completed;

   (b) in the case of a final award under the ICSID Additional Facility Rules, the UNCITRAL Arbitration Rules, or the arbitration rules selected pursuant to Paragraph 1(d) of Article 19 (Submission of a Claim):

      (i) 90 days have elapsed from the date the award was rendered and no disputing party has commenced a proceeding to revise, set aside, or annul the award; or

(ii) a court has dismissed or allowed an application to revise, set aside, or annul the award and there is no further appeal.

6. Subject to Paragraph 5 and the applicable review procedures, the disputing parties shall abide by and comply with an award without delay.

Article 27
Costs

1. The arbitral tribunal shall order that the costs of the proceedings be borne by the unsuccessful disputing party. In exceptional circumstances, the arbitral tribunal may apportion costs between the disputing parties if it determines that apportionment is appropriate in the circumstances of the case. Other reasonable costs, including costs of legal representation and assistance, shall be borne by the unsuccessful disputing party, unless the arbitral tribunal determines that such apportionment is unreasonable in the circumstances of the case. If only parts of the claims have been successful, the costs shall be allocated proportionately according to the number or extent of the successful parts of the claims.

2. The arbitral tribunal shall ensure that all decisions on costs are reasoned and form part of the award.

Article 28
Security for Costs

1. Upon request of a disputing party, the arbitral tribunal may order any disputing party asserting a claim or counterclaim to provide security for costs.

2. In determining whether to order a disputing party to provide security for costs, the arbitral tribunal shall consider all relevant circumstances, including:

   (a) that disputing party's ability to comply with an adverse decision on costs;

   (b) that disputing party's willingness to comply with an adverse decision on costs;

   (c) the effect that providing security for costs may have on that disputing party's ability to pursue its claim or counterclaim; and

   (d) the conduct of the disputing parties.

3. The arbitral tribunal shall specify any relevant terms in an order to provide security for costs and shall fix a time limit for compliance with the order.

4. If a disputing party fails to comply with an order to provide security for costs within 30 days after the arbitral tribunal's order or within any other time period set by the arbitral tribunal, the arbitral tribunal may suspend the proceeding. If the proceeding is suspended for more than 90 days, the arbitral tribunal may, after consulting with the disputing parties, order the discontinuance of the proceeding.

5. A disputing party shall promptly disclose any material change in the circumstances upon which the arbitral tribunal ordered security for costs.

6. The arbitral tribunal may at any time modify or revoke its order on security for costs, on its own initiative or upon a disputing party's request.

Article 29
Consolidation

Where two or more claims have been submitted separately to arbitration under Article 19 (Submission of a Claim) and the claims have a question of law or fact in common and arise out of the same or similar events or circumstances, all concerned disputing parties may agree to consolidate those claims.

Article 30
Discontinuance

If, following the submission of a claim under this Section, the disputing investor fails to take any steps in the proceedings within 180 days or such period as the disputing parties may agree, the disputing investor shall be deemed to have withdrawn its claim and to have discontinued the proceedings. The arbitral tribunal shall, at the request of the disputing Party, and after giving notice to the disputing parties, issue an order taking note of the discontinuance of the proceedings. After such an order has been rendered, the authority of the arbitral tribunal shall lapse.

Article 31
Service of Documents

1. Notices and other documents in disputes under this Section shall be served on Indonesia by delivery to:

   Director General for Legal Affairs and International Treaties
   Ministry of Foreign Affairs
   Jl. Taman Pejambon No. 6
   Jakarta 10110
   INDONESIA

2. Notices and other documents in disputes under this Section shall be served on Switzerland by delivery to:

State Secretariat for Economic Affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
SWITZERLAND

SECTION TWO
SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE PARTIES

Article 32
Scope

This Section applies to the settlement of disputes between the Parties arising from the interpretation or application of the provisions of this Agreement.

Article 33
Consultations

1. Either Party may request in writing consultations on the interpretation or application of this Agreement. If a dispute arises between the Parties on the interpretation or application of this Agreement, it shall, to the extent possible, be settled amicably through consultations.

2. In the event the dispute is not settled through the means mentioned above within 6 months from the date such consultations were requested in writing, then, unless the Parties agree otherwise, either Party may submit such dispute to an arbitral tribunal established in accordance with this Section or, by agreement of the Parties, to any other international tribunal.

Article 34
Constitution of Arbitral Tribunal

1. Arbitration proceedings shall initiate upon written notice delivered by one Party (hereinafter referred to as "requesting Party") to the other Party

(hereinafter referred to as "respondent Party") through diplomatic channels. The notice shall identify the specific measure at issue and provide details of the factual and legal basis of the complaint (including the provisions of this Agreement to be addressed by the arbitral tribunal) sufficient to present the problem clearly.

2. Each Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrators shall appoint a chairman who shall be a national of a non-Party which has diplomatic relations with the Parties. If one of the Parties has not appointed its arbitrator and has not followed the invitation of the other Party to make that appointment within two months of the notice for arbitration, the arbitrator shall be appointed at the request of that Party by the Secretary General of ICSID. If the arbitrators cannot agree on the choice of the chairman within two months of their appointment, the chairman shall be appointed at the request of either Party by the Secretary General of ICSID.

3. If the Secretary General of ICSID is prevented from carrying out the said function or is a national of one of the Parties, the President of the International Court of Justice shall act as appointing authority. If the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or is a national of one of the Parties, the appointments shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented or is a national of one of the Parties, the appointments shall be made by the next senior member of the Court who is not a national of a Party.

4. The arbitrators shall have experience or expertise in public international law and investment law and the resolution of disputes arising under international investment law. The arbitrators shall be independent from the Parties, and not be affiliated to or receive instructions from either of them.

5. In the event an arbitrator appointed under this Article resigns or becomes unable to act, a successor shall be appointed in the same manner as prescribed for the appointment of the original arbitrator, and he or she shall have the same powers and duties that the original arbitrator had.

6. Each Party shall bear the costs of its appointed arbitrator and of any legal representation in the proceedings. The costs of the chairman of the arbitral tribunal and of other expenses associated with the conduct of the arbitration shall be borne equally by the Parties, unless the arbitral tribunal decides otherwise.

Article 35
Seat of Arbitration

Unless the Parties agree otherwise, the seat of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal.

Article 36
Arbitral Proceedings

1. An arbitral tribunal established under this Section shall decide all questions submitted by the requesting Party and, subject to any agreement between the Parties, determine its own procedure. At any stage of the proceedings, the arbitral tribunal may propose to the Parties that the dispute be settled amicably.

2. An arbitral tribunal established in conformity with Article 34 (Constitution of Arbitral Tribunal) shall decide the issues in dispute based on the provisions of this Agreement interpreted in accordance with applicable rules of

international law. In addition, it may apply other rules of international law and rules of domestic law wherever appropriate in light of the issues to be resolved.

3. The award shall be issued in writing and shall contain the applicable factual and legal findings. The award shall be final and binding on the Parties and on each arbitral tribunal constituted under this Agreement.

CHAPTER IV
GENERAL PROVISIONS, EXCEPTIONS AND FINAL PROVISIONS

Article 37
More Favourable Conditions

If the legislation of either Party, or international obligations existing at present or established hereafter between the Parties in addition to this Agreement, result in a position entitling investment by investors of the other Party to treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such position shall not be affected by this Agreement.

Article 38
Denial of Benefits

1. A Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Party that is a legal entity of such other Party and to investments of such investor if an investor of a non-Party or the denying Party owns or controls the legal entity and the legal entity has no substantive business operations in the territory of such other Party.

2. A Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Party that is a legal entity of such other Party and to investments of such investor if persons of a non-Party own or control the legal entity and the denying Party adopts or maintains measures with respect to the non-Party or a person of the non-Party that relate to the maintenance of international peace and security and prohibit transactions with the legal entity or that would be violated or circumvented if the benefits of this Agreement were accorded to the legal entity or to its investments.

Article 39
Transparency

1. Each Party shall without delay publish or otherwise make publicly available its laws, regulations and international agreements that may affect the investments of investor of the other Party.

2. Each Party shall, upon request by the other Party, respond within a reasonable period of time to specific questions from and provide information to the other Party with respect to matters referred to in Paragraph 1.

Article 40
Disclosure of Information

1. Notwithstanding Article 5 (National Treatment), a Party may require an investor of the other Party, or its investment, to provide information concerning that investment solely for informational or statistical purposes. The Party shall protect such business information that is confidential from any disclosure that would prejudice the competitive position of the investor or its investment. Nothing in this Paragraph shall be construed to prevent a Party from otherwise obtaining or disclosing information in connection with the equitable and good faith application of its law.

2. Nothing in this Agreement shall require either Party to provide confidential information the disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public interest, or which would prejudice the legitimate commercial interests of particular legal entities, public or private.

Article 41
General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination against the other Party or its investors where like conditions prevail, or a disguised restriction on investments of investors of the other Party in the territory of a Party, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by a Party of measures:

(a) necessary to protect public morals or to maintain public order[13];

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:

(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on a contract;

(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;

(iii) safety.

(d) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value; or

[13] The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.

(e) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption.

Article 42

Prudential Measures

1. Nothing in this Agreement shall prevent a Party from adopting or maintaining measures in a non-discriminatory manner relating to financial services for prudential reasons[14], including:

   (a) the protection of investors, depositors, policy holders, policy claimants, as well as financial market participants, or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial institution;

   (b) ensuring the integrity and stability of a Party's financial system.

2. The measures taken by a Party pursuant to Paragraph 1 shall not be used as a means of avoiding the commitments or obligations of the Party under this Agreement.

Article 43

Promotion and Facilitation of Investments

1. Subject to its laws and regulations, each Party shall endeavour to cooperate in the facilitation of investments between the Parties including through:

[14] The Parties understand that the term 'prudential reasons' includes the maintenance of the safety, soundness, integrity or financial responsibility of individual financial service suppliers as well as the safety, and financial and operational integrity of payment and clearing systems.

(a) creating the necessary environment for all forms of investments;

(b) simplifying procedures for investment applications and approvals;

(c) promoting dissemination of investment information, including investment rules, regulations, policies and procedures; and

(d) establishing an appropriate mechanism, to the extent possible, to provide assistance and advisory services to investors including facilitation of operating licences and permits.

2. Subject to its laws and regulations, cooperation activities under Paragraph 1(d) may be built on existing agreements or arrangements already in place for economic cooperation.

3. Nothing in this Article shall be construed to affect any obligation in the provisions of Chapter II (Investment Protection), or be subject to or otherwise affect any dispute resolution proceedings under this Agreement.

Article 44

Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the day of receipt of the second notification through diplomatic channels confirming that both Parties have complied with the legal requirements for the entry into force of international agreements.

2. Notwithstanding Article 2 (Scope of Agreement), a claim may be submitted pursuant to the provisions of the Agreement of 6 February 1974 between the Government of the Swiss Confederation and the Government of the

Republic of Indonesia on the promotion and reciprocal protection of investments, the termination of which became effective on 8 April 2016 (hereinafter referred to as "previous Agreement"), pursuant to the rules and procedures established in the previous Agreement, and provided that no more than one year have elapsed since the date of entry into force of this Agreement.

3. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties in writing. The amendments shall enter into force in accordance with the same legal procedure prescribed under Paragraph 1.

4. This Agreement shall remain in force for a period of 10 (ten) years and shall continue in force thereafter, unless, at any time after the expiry of the initial period of 10 (ten) years, either Party notifies in writing the other Party of its intention to terminate this Agreement. The notice of termination shall become effective one year after it has been received by the other Party.

5. In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a further period of 10 (ten) years from that date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Davos on the twenty fourth day of May 2022 in the French, Indonesian, and English languages, all texts being equally authentic. If there is any divergence concerning interpretation, the English text shall prevail.

For the Swiss Federal Council



For the Government of the Republic of Indonesia



ANNEX A
EXPROPRIATION

The Parties confirm their shared understanding that:

1. An action or a series of actions by a Party cannot constitute an expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property right or property interest in an investment.

2. Paragraph 1 of Article 7 (Expropriation) addresses two situations. The first is direct expropriation, where an investment is nationalised or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure.

3. The second situation addressed by Paragraph 1 of Article 7 (Expropriation) is indirect expropriation, where an action or series of actions by a Party has an effect equivalent to direct expropriation without formal transfer of title or outright seizure.

   (a) The determination of whether an action or series of actions by a Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors:

      (i) the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions by a Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred;

      (ii) the duration of the action or series of actions by a Party;

(iii) the extent to which the government action interferes with distinct, reasonable investment-backed expectations[15]; and

(iv) the character of the government action, notably its objective and whether the action is disproportionate to the public purpose.

(b) For greater certainty, except in rare circumstances when the impact of an action or series of actions is so severe in light of its purpose that it appears manifestly excessive, non-discriminatory regulatory actions by a Party that are designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as public health, safety and the environment, do not constitute indirect expropriations.

[15] For greater certainty, whether an investor's investment-backed expectations are reasonable depends, to the extent relevant, on factors such as whether the government provided the investor with binding written assurances and the nature and extent of governmental regulation or the potential for government regulation in the relevant sector.

ANNEX B
CODE OF CONDUCT OF ARBITRATORS

Responsibilities in the Process

1. Every arbitrator shall avoid impropriety and the appearance of impropriety, be independent and impartial, avoid direct and indirect conflicts of interests and observe high standards of conduct so that the integrity and impartiality of the dispute settlement process is preserved. Former arbitrators shall comply with the obligations in Paragraphs 17, 18 and 20.

Disclosure Obligations

2. Prior to confirmation of his or her selection as an arbitrator under this Agreement, a candidate shall disclose any interest, relationship or matter that is likely to affect his or her independence or impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or bias in the proceeding. To this end, a candidate shall make all reasonable efforts to become aware of any such interests, relationships and matters.

3. Once selected, an arbitrator shall continue to make all reasonable efforts to become aware of any interests, relationships and matters referred to in Paragraph 2 and shall disclose them by communicating them in writing to the disputing parties. The obligation to disclose is a continuing duty, which requires an arbitrator to disclose any such interests, relationships and matters that may arise at any stage of the proceeding.

Performance of Duties by Arbitrators

4. An arbitrator shall comply with the provisions of Chapter III (Dispute

Settlement) and the applicable rules of procedure.

5. Once selected, an arbitrator shall perform his or her duties thoroughly and expeditiously throughout the course of the proceeding with fairness and diligence.

6. An arbitrator shall not deny other arbitrators the opportunity to participate in all aspects of the proceeding.

7. An arbitrator shall not go beyond the request of the disputing parties and shall not delegate the duty to decide to any other person.

8. An arbitrator shall take all appropriate steps to ensure that his or her assistant and staff are aware of, and comply with, Paragraphs 1, 2, 3, 18, 19 and 20.

9. After the arbitral tribunal has been constituted, an arbitrator shall not engage in ex parte contacts concerning the proceeding.

10. An arbitrator shall not communicate matters concerning actual or potential violations by another arbitrator unless the communication is to both disputing parties or is necessary to ascertain whether that arbitrator has violated or may violate this Annex.

Independence and Impartiality of Arbitrators

11. An arbitrator shall be independent and impartial. An arbitrator shall act in a fair manner and shall avoid creating an appearance of impropriety or bias.

12. An arbitrator shall not be influenced by self-interest, outside pressure, political considerations, public clamour, loyalty to a Party or a disputing party

or fear of criticism.

13. An arbitrator shall not, directly or indirectly, assume any obligation or accept any benefit that would in any way interfere, or appear to interfere, with the proper performance of his or her duties.

14. An arbitrator shall not use his or her position on the arbitral tribunal to advance any personal or private interests. An arbitrator shall avoid actions that may create the impression that others are in a special position to influence the arbitrator. An arbitrator shall make every effort to prevent or discourage others from representing themselves as being in such a position.

15. An arbitrator shall not allow past or existing financial, business, professional, family or social relationships or responsibilities to influence the arbitrator's conduct or judgment.

16. An arbitrator shall avoid entering into any relationship, or acquiring any financial interest, that is likely to affect his or her impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or bias.

Duties in Certain Situations

17. An arbitrator or former arbitrator shall avoid actions that may create the appearance that the arbitrator was biased in carrying out his or her duties or would benefit from the decision or award of the arbitral tribunal.

Maintenance of Confidentiality

18. An arbitrator or former arbitrator shall not at any time disclose or use any non-public information concerning the proceeding or acquired during the proceeding except for the purposes of the proceeding and to the extent that

disclosure may be required by legal or constitutional requirements, and shall not, in any case, disclose or use any such information to gain personal advantage or advantage for others or to affect adversely the interest of others.

19. An arbitrator shall not disclose an arbitral tribunal award or parts thereof prior to its publication.

20. An arbitrator or former arbitrator shall not at any time disclose the deliberations of an arbitral tribunal, or any arbitrator's view, except as required by legal or constitutional requirements.